

PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA SUKABUMI
TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Salawat dan Salam kami sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari Alam Jahiliah ke Alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Bupati/Walikota menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Kabupaten/Kota. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Sukabumi Tahun 2016 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Sukabumi, Maret 2017

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sukabumi,**

cap.ttd.

ISKANDAR, S.IP., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19700517 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	7
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Konsep dan Definisi	10
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM	19
2.1 Peta Kota Sukabumi	19
2.2 Keadaan Geografis	19
2.3 Letak Geografis	22
2.4 Luas Wilayah	22
2.5 Visi dan Misi Kota Sukabumi	24
2.6 Visi dan Misi Kepala Daerah	24
2.7 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	25
2.8 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi	29

BAB	III	KUANTITAS PENDUDUK	31
	3.1.	Persebaran Penduduk	31
	3.1.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk	31
	3.1.2	Kepadatan Penduduk (<i>Population Density</i>)	37
	3.2.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografis.....	41
	3.2.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	41
	3.2.2	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	62
	3.2.3	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	64
	3.3.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	70
	3.3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ...	70
	3.3.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	73
	3.4.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	77
	3.4.1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	78
	3.4.2	Kepemilikan KTP-el	80
	3.4.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	81
	3.4.4	Kepemilikan Akta Perkawinan	83
	3.4.5	Kepemilikan Akta Perceraian	87
BAB	IV	KUALITAS PENDUDUK	88
	4.1.	Indikator Kesehatan	88
	4.1.1	Kelahiran (<i>Fertilitas</i>)	88
	4.1.2	Kematian (<i>Mortalitas</i>)	91

4.2	Indikator Pendidikan.....	94
4.2.1	Angka Melek Huruf (AMH)	94
4.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	95
4.2.3	Angka Partisipasi Murni (APM)	100
4.3	Indikator Keluarga Berencana	105
4.3.1	Pasangan Usia Subur (PUS)	105
4.3.2	Peserta KB Aktif	107
4.3.3	Peserta KB Aktif Menurut Jalur Pelayanan	109
4.3.4	Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB	111
4.3.5	Tahapan Keluarga	113
4.4	Indikator Tenaga Kerja	118
4.4.1	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	118
4.5	Indikator Sosial	126
4.5.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	126
4.6	Mobilitas Penduduk	129
4.6.1	Angka Migrasi Masuk	129
4.6.2	Angka Migrasi Keluar	134
4.6.3	Angka Migrasi Netto	136
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	137
5.1.	Kesimpulan	137
5.2	Saran	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi & Luas Wilayah Se-Kota Sukabumi	23
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016	32
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	33
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk per Kelurahan	35
Tabel 3.4	Kepadatan Penduduk Tahun 2016	38
Tabel 3.5	Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2016	42
Tabel 3.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	45
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	48
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	50
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	52
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	54
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Kecamatan Baros Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	56
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	58
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeureum Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	60
Tabel 3.14	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Tahun 2016	65
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2016	70

Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2016	71
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan	73
Tabel 3.18	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016	74
Tabel 3.19	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Menurut Usia	76
Tabel 3.20	Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah	76
Tabel 3.21	Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi	77
Tabel 3.22	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2016	79
Tabel 3.23	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el Tahun 2016	80
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016	81
Tabel 3.25	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016	82
Tabel 3.26	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Tahun 2016	86
Tabel 3.27	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Umur Tahun 2016	86
Tabel 3.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan	87
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2016	92
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Di Kota Sukabumi Tahun 2016	94
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD per Kecamatan	96

Tabel 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/Sederajat per Kecamatan	97
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat per Kecamatan	98
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat per Kecamatan	99
Tabel 4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/Sederajat	101
Tabel 4.8	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/Sederajat	102
Tabel 4.9	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/Sederajat	103
Tabel 4.10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	104
Tabel 4.11	Data Pasangan Usia Subur (PUS)	106
Tabel 4.12	Data Peserta KB Aktif (CU/PUS)	107
Tabel 4.13	Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Pemerintah	109
Tabel 4.14	Data PUS Bukan Peserta KB	112
Tabel 4.15	Data Tahapan Keluarga	116
Tabel 4.16	Jumlah Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur per Kecamatan Tahun 2016	120
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja per Kecamatan Tahun 2016	121
Tabel 4.18	Angkatan Kerja per Kecamatan Tahun 2016	122
Tabel 4.19	Ikhtisar AK I Tahun 2016 Penempatan, Penghapusan, dan yang Belum Ditempatkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	124
Tabel 4.20	Rincian Penempatan Berdasarkan AK.I Tahun 2016	125
Tabel 4.21	Rekapitulasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2016	126
Tabel 4.22	Penanganan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2016	128
Tabel 4.23	Migrasi Penduduk Masuk Kota Sukabumi Tahun 2016	130

Tabel 4.24	Migrasi Penduduk Masuk menurut Kelompok Umur Tahun 2016	131
Tabel 4.25	Migrasi Penduduk Masuk menurut Pekerjaan Tahun 2016	132
Tabel 4.26	Migrasi Penduduk Keluar Kota Sukabumi Tahun 2016	135
Tabel 4.27	Migrasi Penduduk Keluar menurut Alasan Kepindahan Tahun 2016	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016	32
Grafik 3.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	33
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk per Kelurahan	36
Grafik 3.4	Kepadatan Penduduk Tahun 2016	39
Grafik 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur umur Tahun 2016	43
Grafik 3.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2016	71
Grafik 3.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016	74
Grafik 4.1	Persentase PUS per Kecamatan	106
Grafik 4.2	Peserta KB Aktif (CU/PUS)	108
Grafik 4.3	Peserta KB Aktif (CU/PUS) Menurut Jalur Pelayanan	110
Grafik 4.4	PUS Bukan Peserta KB	112
Grafik 4.5	Tahapan Keluarga Kota Sukabumi	117

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Piramida Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016	47
Diagram 3.2	Piramida Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Tahun 2016	49
Diagram 3.3	Piramida Penduduk Kecamatan Cikole Tahun 2016	51
Diagram 3.4	Piramida Penduduk Kecamatan Citamiang Tahun 2016	53
Diagram 3.5	Piramida Penduduk Kecamatan Warudoyong Tahun 2016	55
Diagram 3.6	Piramida Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2016	57
Diagram 3.7	Piramida Penduduk Kecamatan Lembursitu Tahun 2016	59
Diagram 3.8	Piramida Penduduk Kecamatan Cibereum Tahun 2016	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektoral, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan.

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan Nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.
2. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan Nasional.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar ke depan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Pasal 17 dinyatakan bahwa :

“Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan”.

Hadirnya Undang-Undang ini sebagai landasan dasar yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam arti fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut disebutkan dalam Bab VIII Pasal 49 :

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan sebagai dasar kebijakan, penyelenggaraan pembangunan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, merupakan penjabaran amanat dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, karena masalah kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektoral. Pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan.

Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Dalam hal ini, data kependudukan mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menentukan arah kebijakan pembangunan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkatan administrasi pemerintahan (kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Kependudukan bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Variabel data yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Sukabumi dan prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang. Disisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Kerangka pikir penyusunan profil perkembangan kependudukan mencakup 5 (lima) hal pokok bahasan, antara lain:

1. Menyajikan profil perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak tergambar kondisi yang sedang berlangsung;

2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk;
3. Teridentifikasinya potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional;
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong terwujudnya *database* penduduk dan analisis *database* kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi secara transparan dan komprehensif.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
2. Sebagai bahan analisis dalam penyusunan program-program kependudukan.
3. Sebagai bahan evaluasi dan acuan pengambilan kebijakan bidang kependudukan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
13. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi.

1.4. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan Kota Sukabumi dengan segala aspek yang terkait di dalamnya berdasarkan data yang dikumpulkan pada Tahun 2016, meliputi :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen, dan urbanisasi.
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.5. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi pokok yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
3. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);

5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
8. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
10. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);

11. Mobilitas penduduk non permanen (*circualtion/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik/nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
12. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis obilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
13. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
14. Migrasi kembali (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
15. Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
16. Migrasi risen (*rencent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administratsi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktudiadakan pendataan bertempat tinggal didaerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;

17. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
18. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
19. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
20. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
21. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
22. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
23. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
24. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;

-
25. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
 26. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
 27. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 28. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 29. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
 30. Angka Kematian, Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
 31. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;

32. Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
33. Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
34. Buta Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengataman dasar;
35. Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekotah menurut golongan umur sekotah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
36. Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
37. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk ketompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Konsep dan Definisi
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SUKABUMI

- 2.1. Peta Kota Sukabumi
- 2.2. Keadaan Geografis
- 2.3. Letak Geografis
- 2.4. Luas Wilayah
- 2.5. Visi dan Misi Kota Sukabumi
- 2.6. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2.7. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi
- 2.8. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

BAB III KUANTITAS PENDUDUK

- 3.1. Persebaran Penduduk
 - 3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk
 - 3.1.2 Kepadatan Penduduk
- 3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

-
- 3.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
 - 3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)
 - 3.2.3 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
 - 3.3. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial
 - 3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 - 3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
 - 3.4. Kepemilikan Data Kependudukan
 - 3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 3.4.2 Kepemilikan KTP-el
 - 3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran
 - 3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan
 - 3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

4.1. Indikator Kesehatan

- 4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)
- 4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

4.2. Indikator Pendidikan

- 4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)
- 4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
- 4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

4.3. Indikator Keluarga Berencana (KB)

- 4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)
- 4.3.2 Peserta KB Aktif
- 4.3.3 Peserta KB Aktif Jalur Pelayanan

4.3.4 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

4.3.5 Tahapan Keluarga

4.4.Indikator Tenaga Kerja

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

4.5.Indikator Sosial

4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.6.Mobilitas Penduduk

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

4.6.3 Angka Migrasi Netto

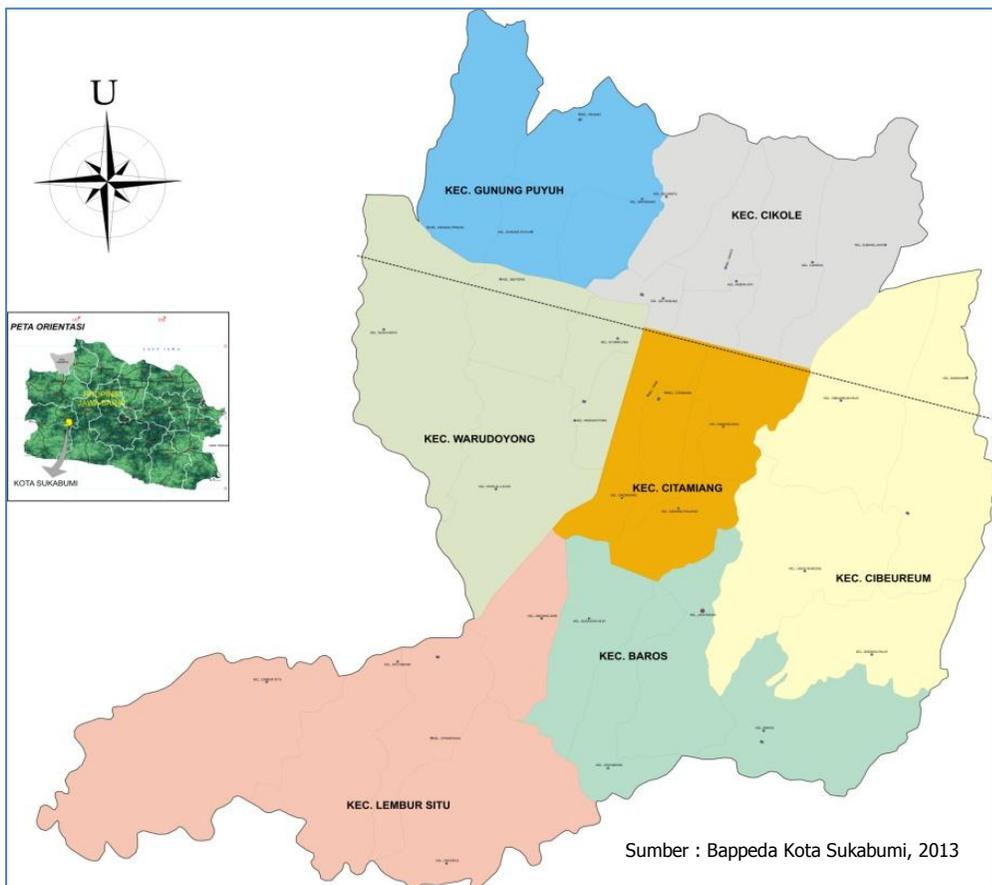
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Peta Kota Sukabumi



2.2. Keadaan Geografis

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan

pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta sehingga terjadi kegiatan ekspor-impor. Namun demikian dalam perjalanan sejarah kejayaan itu menyurut dikarenakan kesinambungan pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset yang berbasis perkebunan tidak lagi menguntungkan akibat semakin ketatnya persaingan dengan negara-negara produsen sejenis.

Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja, Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang memiliki areal 1.215 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 Ha, sehingga ada penambahan desa-desa dan kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibereum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sukabumi (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nyalindung (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Cisaat (Kabupaten Sukabumi)
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Sukabumi)

Batas wilayah administrasi dan posisi Kota Sukabumi dalam Konstelasi Regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya ini, merupakan salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat (RTRW Jawa Barat) yang berpotensi untuk mengembangkan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (*hinterland*).

Sesuai dengan kondisi obyektif yang terus berkembang, pertumbuhan kota mengarah kepada kegiatan perekonomian yang berbasis pada jasa meliputi perdagangan, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, pertanian, hal inilah yang mendasari pemikiran untuk menetapkan visi kedepan keberadaan Kota Sukabumi **”Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa”** yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12).

Visi kota tersebut sejalan dengan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP yang terdiri dari komponen peningkatan kemampuan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Letak Geografis

Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT dan $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur Timur, $6^{\circ} 50' 44''$ Lintang Selatan, terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan $0^{\circ} - 3^{\circ}$ dan $3^{\circ} - 8^{\circ}$ di bagian utara. Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Hal ini juga membuka kesempatan kepada Kota Sukabumi untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan visi Kota Sukabumi dengan didukung oleh tenaga profesional, kelengkapan sarana dan prasarana perekonomian, jasa pendidikan dan kesehatan berskala pelayanan regional.

2.4. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan $\pm 7,5$ Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 355 Rukun Warga (RW) dan 1.548 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan tanah paling banyak dipergunakan untuk pertanian yaitu seluas 2.316 Ha dan yang paling kecil adalah penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 300 Ha. Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,89 Km² atau sebesar 18,52% dari luas Kota Sukabumi, sedangkan

Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Citamiang dengan luas 4,04 Km². Adapun luas masing- masing kecamatan di Kota Sukabumi dapat di lihat pada Table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi & Luas Wilayah se-Kota Sukabumi

N O	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah RT	Jumlah RW	Kepadatan (jiwa/km2)
1	GUNUNG PUYUH	Gunung Puyuh				
		Karamat	0.94	44	12	8.650
		Sriwidari	1.11	37	9	8.755
		KarangTengah	0.95	58	14	11.104
			2.50	74	16	7.383
2	CIKOLE	Cikole	0.79	36	7	7.268
		Selabatu	0.97	60	9	10.022
		Gn. Parang	0.64	35	9	6.398
		Kebonjati	0.48	55	10	15.565
		Cisarua	2.00	75	19	9.354
		Subangjaya	2.20	76	14	7.373
3	CITAMIANG	Citamiang	0.73	42	7	12.962
		Tipar	0.46	49	8	20.800
		Nanggaleng	1.20	65	13	13.330
		Gedong Pnjng	1.00	30	6	8.345
		Cikondang	0.65	41	9	13.391
4	WARU DOYONG	Warudoyong	0.43	32	5	14.953
		Nyomplong	0.52	49	9	13.862
		Dayeuhluhur	2.33	76	21	6.675
		Sukakarya	3.04	47	13	4.996
		Benteng	1.28	60	10	9.725
5	BAROS	Baros	1.79	62	18	8.959
		Jayaraksa	1.45	32	7	4.926
		Jayamekar	1.59	27	7	3.234
		SudajayaHilir	1.29	31	8	5.071
6	LEMBURSIU	Cipanengah	1.53	34	8	5.278
		Situmekar	1.54	30	8	3.854
		Lembursitu	3.22	67	21	3.447
		Cikundul	1.58	32	10	4.618
		Sindangsari	1.02	21	6	5.606

7	CIBEUREUM	Cibeureum Hilir	1.84	53	12	7.152
		Babakan	2.65	41	10	3.385
		Sindangpalay	1.65	34	7	4.332
		Limusnunggal	2.63	43	13	4.181
JUMLAH		33	48.00	1548	355	

2.5. VISI DAN MISI KOTA SUKABUMI

Visi Kota Sukabumi :

Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Misi Kota Sukabumi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas;
3. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Usaha Lainnya Yang Berdaya Saing Tinggi;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Amanah;
6. Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Nyaman dan Indah.

2.6. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah :

”Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil A’lamin”

Misi Kepala Daerah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berilmu;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar, dan melayani masyarakat dengan ikhlas;
3. Mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
5. Meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota.

2.7. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

Visi :

“Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Yang Tertib, Akurat, dan Dinamis”

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi masuk kedalam misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi pada Point 2 (dua) yaitu **”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas”**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang tidak ditindaklanjuti dan

meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana PAD meningkat pada setiap tahun yang diarahkan pada ***"Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi"***.

Sedangkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan secara ringkas seperti berikut ini :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengertian dari :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan yaitu :

1. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pendaftaran penduduk harus berjenjang dimulai

dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat yaitu : dalam melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, data yang ada dan yang diberikan itu harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis yaitu : dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada itu harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas;

Untuk mewujudkan Misi tersebut ada beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan Dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program SIAK merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, walaupun belum seluruhnya memanfaatkan teknologi tersebut karena satu dan lain hal;
3. Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebaran informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan tindak lanjutnya. Selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena tanpa kepedulian dan

peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang.
Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memiliki motto pelayanan : **“Cermat, Tepat, Bersahabat”**, dengan janji pelayanan : **“Cermat** dalam penyajian data, **Tepat** waktu dalam pengurusan, **Bersahabat** dalam pelayanan”.

2.8. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menjabarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah satu lembaga teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

3.1. Persebaran Penduduk

Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 330.974 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu sebanyak 321.328 jiwa, sehingga dapat dihitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,03%.

3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,72%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,53%), persebaran penduduk tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2015 Kecamatan Cikole (18,82%), Kecamatan Baros (10,43%) dan Tahun 2014 Kecamatan Cikole (18,95%), Kecamatan Baros (10,45%).

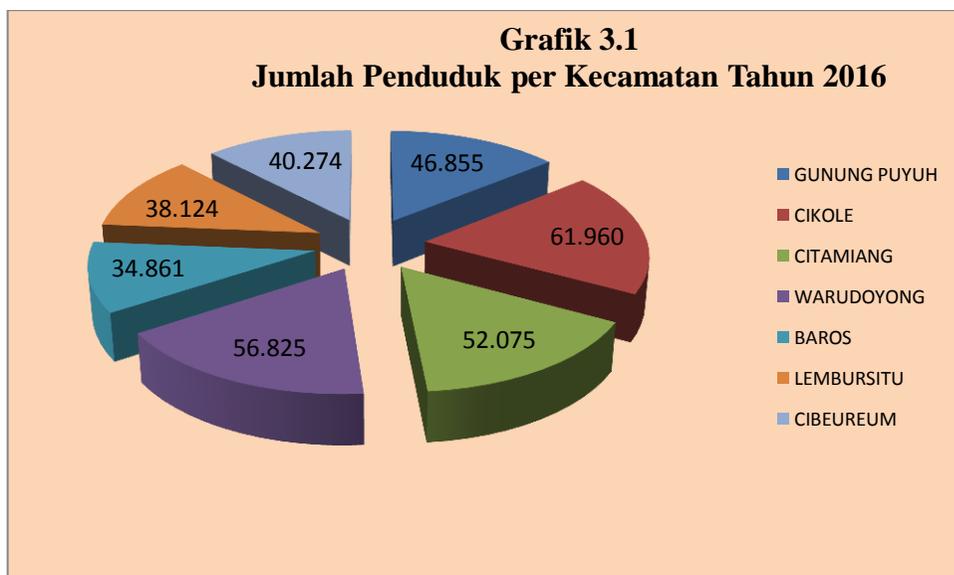
Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	%
GUNUNG PUYUH	46.855	14,16
CIKOLE	61.960	18,72
CITAMIANG	52.075	15,73
WARUDOYONG	56.825	17,17
BAROS	34.861	10,53
LEMBURSITU	38.124	11,52
CIBEUREUM	40.274	12,17
JUMLAH	330.974	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016.

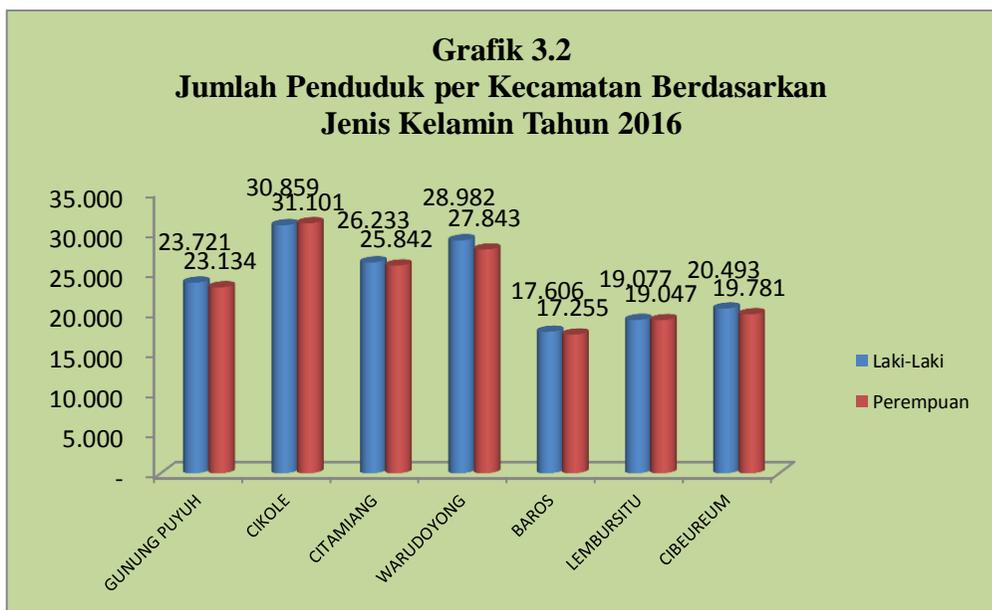


Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin, disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

KECAMATAN	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	% Jiwa	Jenis Kelamin Terbanyak	% Jiwa
	Laki-Laki	% Jiwa	Perempuan	% Jiwa				
GUNUNG PUYUH	23.721	50,63	23.134	49,37	46.855	14,16	Laki-Laki	50,63
CIKOLE	30.859	49,80	31.101	50,20	61.960	18,72	Perempuan	50,20
CITAMIANG	26.233	50,38	25.842	49,62	52.075	15,73	Laki-Laki	50,38
WARU DOYONG	28.982	51,00	27.843	49,00	56.825	17,17	Laki-Laki	51,00
BAROS	17.606	50,50	17.255	49,50	34.861	10,53	Laki-Laki	50,50
LEMBUR SITU	19.077	50,04	19.047	49,96	38.124	11,52	Laki-Laki	50,04
CIBEUREUM	20.493	50,88	19.781	49,12	40.274	12,17	Laki-Laki	50,88
JUMLAH	166.971	50,45	164.003	49,55	330.974	100		

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 330.974 jiwa terdiri dari 166.971 jiwa laki-laki (50,45%) dan 164.003 jiwa perempuan (49,55%). Apabila dilihat jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 321.328 jiwa terdiri dari 162.311 jiwa laki-laki (50,51%) dan 159.017 jiwa perempuan (49,49%) dan jumlah penduduk Kota Sukabumi Tahun 2014 sebanyak 320.572 jiwa terdiri dari 162.480 jiwa laki-laki (50,68%) dan 158.092 jiwa perempuan (49,32%). Hal ini berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi di atas 50% berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan jika kita lihat Grafik 3.2 per kecamatan menunjukkan jumlah yang bervariasi, yaitu :

- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,63%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cikole lebih banyak berjenis kelamin perempuan (50,20%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Citamiang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,38%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Warudoyong lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (51%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Baros lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,50%)
- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Lembursitu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,04%)

- ❖ Jumlah penduduk Kecamatan Cibeureum lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (50,88%)

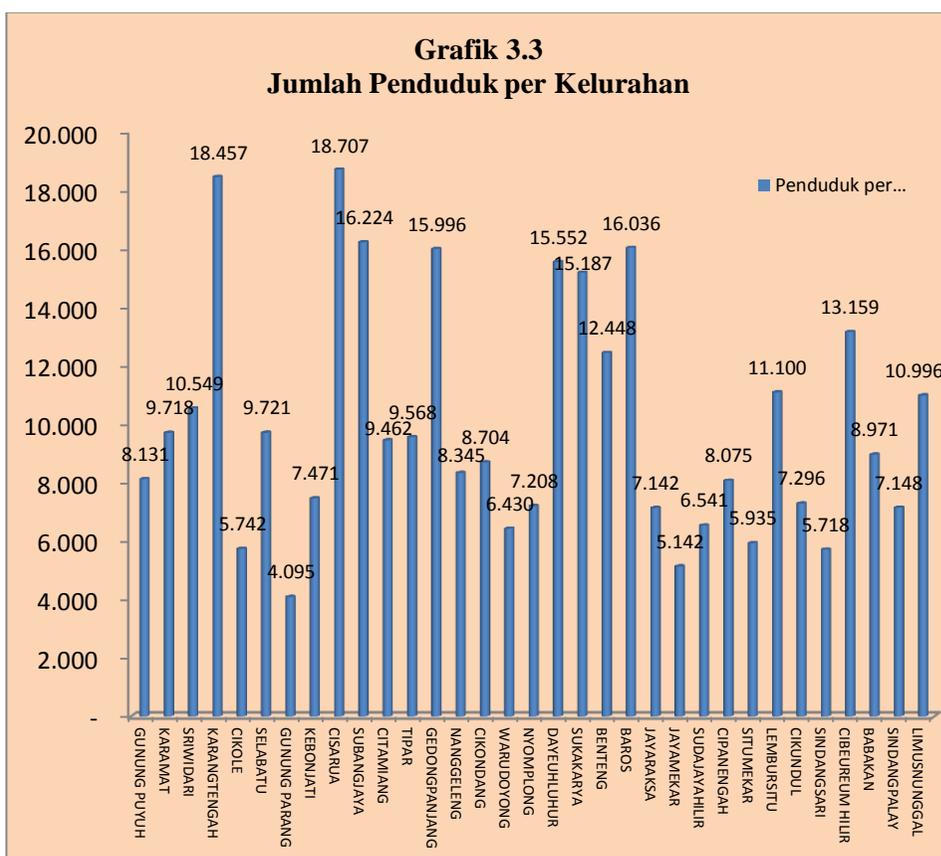
Jumlah Penduduk per kelurahan disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk per Kelurahan

KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			%
	L	P	L+P	
GUNUNG PUYUH				
GUNUNG PUYUH	4.058	4.073	8.131	2,46
KARAMAT	4.931	4.787	9.718	2,94
SRIWIDARI	5.223	5.326	10.549	3,19
KARANGTENGAH	9.509	8.948	18.457	5,58
CIKOLE				
CIKOLE	2.797	2.945	5.742	1,73
SELABATU	4.802	4.919	9.721	2,94
GUNUNG PARANG	1.997	2.098	4.095	1,24
KEBONJATI	3.696	3.775	7.471	2,26
CISARUA	9.486	9.221	18.707	5,65
SUBANGJAYA	8.081	8.143	16.224	4,90
CITAMIANG				
CITAMIANG	4.730	4.732	9.462	2,86
TIPAR	4.824	4.744	9.568	2,89
GEDONGPANJANG	8.169	7.827	15.996	4,83
NANGGELENG	4.165	4.180	8.345	2,52
CIKONDANG	4.345	4.359	8.704	2,63
WARUDOYONG				
WARUDOYONG	3.271	3.159	6.430	1,94
NYOMPLONG	3.623	3.585	7.208	2,18
DAYEUHLUHUR	7.968	7.584	15.552	4,70
SUKAKARYA	7.788	7.399	15.187	4,59
BENTENG	6.332	6.116	12.448	3,76
BAROS				
BAROS	8.153	7.883	16.036	4,85
JAYARAKSA	3.603	3.539	7.142	2,16
JAYAMEKAR	2.560	2.582	5.142	1,55
SUDAJAYAHILIR	3.290	3.251	6.541	1,98

LEMBURSITU				
CIPANENGAH	4.051	4.024	8.075	2,44
SITUMEKAR	2.934	3.001	5.935	1,79
LEMBURSITU	5.516	5.584	11.100	3,35
CIKUNDUL	3.713	3.583	7.296	2,20
SINDANGSARI	2.863	2.855	5.718	1,73
CIBEUREUM				
CIBEUREUM HILIR	6.662	6.497	13.159	3,98
BABAKAN	4.575	4.396	8.971	2,71
SINDANGPALAY	3.706	3.442	7.148	2,16
LIMUSNUNGGAL	5.550	5.446	10.996	3,32
JUMLAH	166.971	164.003	330.974	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016.



Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.3, terlihat bahwa Penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2016 yang terbanyak berada di wilayah Kelurahan Cisarua 18.707 (5,65%), disusul Kelurahan Karang Tengah sebanyak 18.457 (5,58%), sedangkan yang terkecil berada di wilayah Kelurahan Gunung Parang sebanyak 4.095 (1,24%), disusul Kelurahan Jayamekar sebanyak 5.142 (1,55%).

3.1.2 Kepadatan Penduduk (*Population Density*)

Kepadatan penduduk disuatu daerah menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk dengan luas daerah yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk per km². Kepadatan penduduk berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah.

Rasio kepadatan penduduk ini dapat menggambarkan distribusi penduduk yang terkonsentrasi di suatu tempat dan memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan ini misalnya dengan membuat program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk.

Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 330.974 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.895 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.895 s.d 6.896 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2015 adalah 6.693 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.693 s.d 6.694 jiwa, dan kepadatan penduduk Tahun 2014 adalah 6.679 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.679 s.d 6.680 jiwa, terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebanyak 202 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.4 di bahwa ini :

Tabel 3.4
Kepadatan Penduduk
Tahun 2016

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (jiwa/Km ²)	Rangking
GUNUNG PUYUH	5,5	46.855	8.519	
GUNUNG PUYUH	0,94	8.131	8.650	13
KARAMAT	1,11	9.718	8.755	14
SRIWIDARI	0,95	10.549	11.104	8
KARANGTENGAH	2,5	18.457	7.383	16
CIKOLE	7,08	61.960	8.751	
CIKOLE	0,79	5.742	7.268	17
SELABATU	0,97	9.721	10.022	9
GUNUNG PARANG	0,64	4.095	6.398	20
KEBONJATI	0,48	7.471	15.565	2
CISARUA	2	18.707	9.354	11
SUBANGJAYA	2,2	16.224	7.375	18
CITAMIANG	4,04	52.075	12.890	
CITAMIANG	0,73	9.462	12.962	7
TIPAR	0,46	9.568	20.800	1
GEDONGPANJANG	1,2	15.996	13.330	5
NANGGELENG	1	8.345	8.345	15
CIKONDANG	0,65	8.704	13.391	6
WARUDOYONG	7,6	56.825	7.477	
WARUDOYONG	0,43	6.430	14.953	4
NYOMPLONG	0,52	7.208	13.862	3
DAYEULUHUR	2,33	15.552	6.675	21
SUKAKARYA	3,04	15.187	4.996	25
BENTENG	1,28	12.448	9.725	10
BAROS	6,12	34.861	5.696	
BAROS	1,79	16.036	8.959	12
JAYARAKSA	1,45	7.142	4.926	26
JAYAMEKAR	1,59	5.142	3.234	33
SUDAJAYAHILIR	1,29	6.541	5.071	24

LEMBURSIU	8,89	38.124	4.288	
CIPANENGAH	1,53	8.075	5.278	23
SITUMEKAR	1,54	5.935	3.854	30
LEMBURSIU	3,22	11.100	3.447	31
CIKUNDUL	1,58	7.296	4.618	27
SINDANGSARI	1,02	5.718	5.606	22
CIBEUREUM	8,77	40.274	4.592	
CIBEUREUM HILIR	1,84	13.159	7.152	19
BABAKAN	2,65	8.971	3.385	32
SINDANGPALAY	1,65	7.148	4.332	28
LIMUSNUNGGAL	2,63	10.996	4.181	29
JUMLAH	48	330.974	6.895	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016.



Kemudian apabila dilihat kepadatan wilayah per kecamatan Tahun 2016, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Citamiang yaitu 12.890, disusul Kecamatan Cikole yaitu 8.751, lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.519, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.477. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.288, disusul dengan Kecamatan Cibeureum yaitu 4.592, dan Kecamatan Baros yaitu 5.696.

Untuk kelurahan yang paling padat Tahun 2016 adalah Kelurahan Tipar yaitu 20.800, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.565, lalu Kelurahan Nyomplong yaitu 13.862, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.234, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.385.

Hal tersebut masih sama kepadatan penduduknya dengan Tahun 2015, yaitu Kecamatan Citamiang yaitu 12.557, disusul Kecamatan Cikole yaitu 8.543, lalu Kecamatan Gunung Puyuh yaitu 8.299, dan Kecamatan Warudoyong yaitu 7.255. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu yaitu 4.177, disusul dengan Kecamatan Cibeureum yaitu 4.411, dan Kecamatan Baros yaitu 5.475.

Begitu juga dengan kelurahan yang paling padat penduduknya Tahun 2015 adalah Kelurahan Tipar yaitu 20.409, kemudian Kelurahan Kebonjati yaitu 15.467, lalu Kelurahan Nyomplong yaitu 13.833, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Jayamekar yaitu 3.130, dan Kelurahan Babakan yaitu 3.164.

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

3.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. seperti misalnya masalah angkatan kerja, penyediaan sarana pendidikan dan lain sebagainya. Karakteristik penduduk paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau sering disebut dengan struktur umur dan jenis kelamin. Indikator karakteristik penduduk adalah Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*), Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur.

Penduduk di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tergolong ke dalam kategori penduduk “Muda”. Sebaliknya sebagian besar negara-negara maju mempunyai penduduk “Tua”. Dibanyak negara berkembang hampir separuh dari penduduknya adalah di bawah 15 tahun dan kurang dari 3% yang berumur 65 tahun atau lebih. Dibanyak negara maju, kurang dari 30% penduduknya berumur kurang dari 15 tahun dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih.

Tabel 3.5
Komposisi Umur Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2016

Golongan Umur	Total (Jiwa)	Keterangan	Komposisi Total	%
0-4	26.158	PENDUDUK MUDA	84.047	25,39
5-9	28.422			
10-14	29.467			
15-19	24.462	PENDUDUK PRODUKTIF	226.772	68,52
20-24	28.499			
25-29	26.873			
30-34	28.619			
35-39	26.540			
40-44	23.859			
45-49	21.812			
50-54	18.909			
55-59	15.283			
60-64	11.916			
65-69	7.431	PENDUDUK TUA	20.155	6,09
70-74	6.365			
>75	6.359			
JUMLAH			330.974	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Kalau kita lihat Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2016 menunjukkan sebesar 68,52% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,39% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 6,09%.

Hal tersebut masih sama dengan data penduduk Tahun 2015 menunjukkan sebesar 68,68% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,51% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 5,81%.

Struktur Umur Penduduk Kota Sukabumi lebih jelas dapat dilihat dalam Grafik 3.5



Jika dilihat Grafik 3.5, maka jumlah penduduk tertinggi Kota Sukabumi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 29.716 jiwa, disusul kelompok umur 5-9

tahun yaitu sebanyak 28.398 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebanyak 5.471 jiwa, disusul kelompok umur 70 – 74 tahun sebanyak 6.474 jiwa.

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin menggambarkan jumlah penduduk untuk kelompok umur tertentu dan jenis kelamin yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan (subyek dan obyek pembangunan).

Informasi penduduk berdasarkan umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	13.643	8,17	12.515	7,63	26.158	7,90	109,01
5-9	14.752	8,84	13.670	8,34	28.422	8,59	107,92
10-14	15.215	9,11	14.252	8,69	29.467	8,90	106,76
15-19	12.553	7,52	11.909	7,26	24.462	7,39	105,41
20-24	14.272	8,55	14.227	8,67	28.499	8,61	100,32
25-29	13.575	8,13	13.298	8,11	26.873	8,12	102,08
30-34	14.521	8,70	14.098	8,60	28.619	8,65	103,00
35-39	13.366	8,00	13.174	8,03	26.540	8,02	101,46
40-44	11.946	7,15	11.913	7,26	23.859	7,21	100,28
45-49	10.802	6,47	11.010	6,71	21.812	6,59	98,11
50-54	9.281	5,56	9.628	5,87	18.909	5,71	96,40
55-59	7.731	4,63	7.552	4,60	15.283	4,62	102,37
60-64	5.975	3,58	5.941	3,62	11.916	3,60	100,57
65-69	3.627	2,17	3.804	2,32	7.431	2,25	95,35
70-75	2.919	1,75	3.446	2,10	6.365	1,92	84,71
>75	2.793	1,67	3.566	2,17	6.359	1,92	78,32
JUMLAH	166.971	100	164.003	100	330.974	100	101,81

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Dari Tabel 3.6 di atas, dilihat dari struktur umur penduduk Kota Sukabumi per 31 Desember 2016, pada struktur umur muda (0-14 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 29.467 jiwa (8,90%) diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 28.422 jiwa (8,59%). Proporsi struktur umur tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2015, pada struktur umur muda (0-14 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 29.716 jiwa (9,25%) diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 28.398 jiwa (8,84%).

Informasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah Kota Sukabumi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD).

Pada Tahun 2016 Kelompok Umur Produktif (15-64 tahun), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 28.619 jiwa (8,65%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 28.499 jiwa (8,61%), sedangkan pada Tahun 2015 proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 28.058 jiwa (8,73%), diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 27.874 jiwa (8,67%).

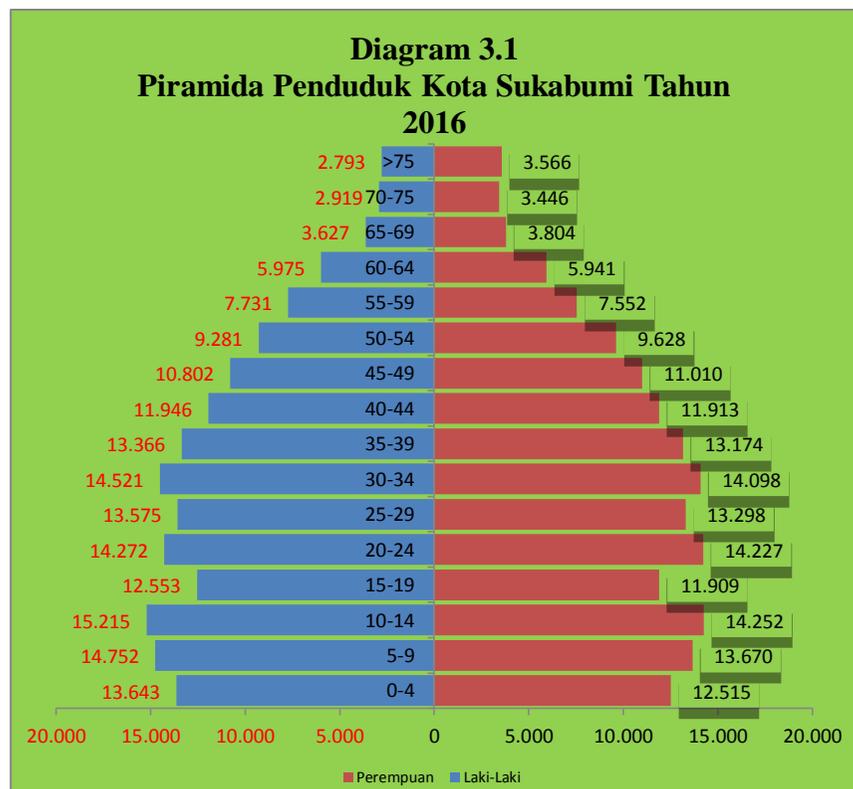
Data ini memberikan informasi kepada pemerintah Kota Sukabumi dalam kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja.

Pemerintah Kota Sukabumi akan memperoleh keuntungan yang besar, jika penduduk usia produktif ini semuanya bisa memperoleh pekerjaan.

Pada Tahun 2016 Kelompok Umur Tua (65 tahun ke atas), proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 7.431 jiwa (2,25%), sedangkan Tahun 2015 proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 6.727 jiwa (2,09%).

c. Piramida Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk. Badan piramida sebelah kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki, sedangkan badan piramida sebelah kanan menunjukkan banyaknya penduduk perempuan.



Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan penduduk masa

yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian, dan migrasi masa lalu dan selanjutnya serta menentukan perkembangan penduduk masa yang akan datang.

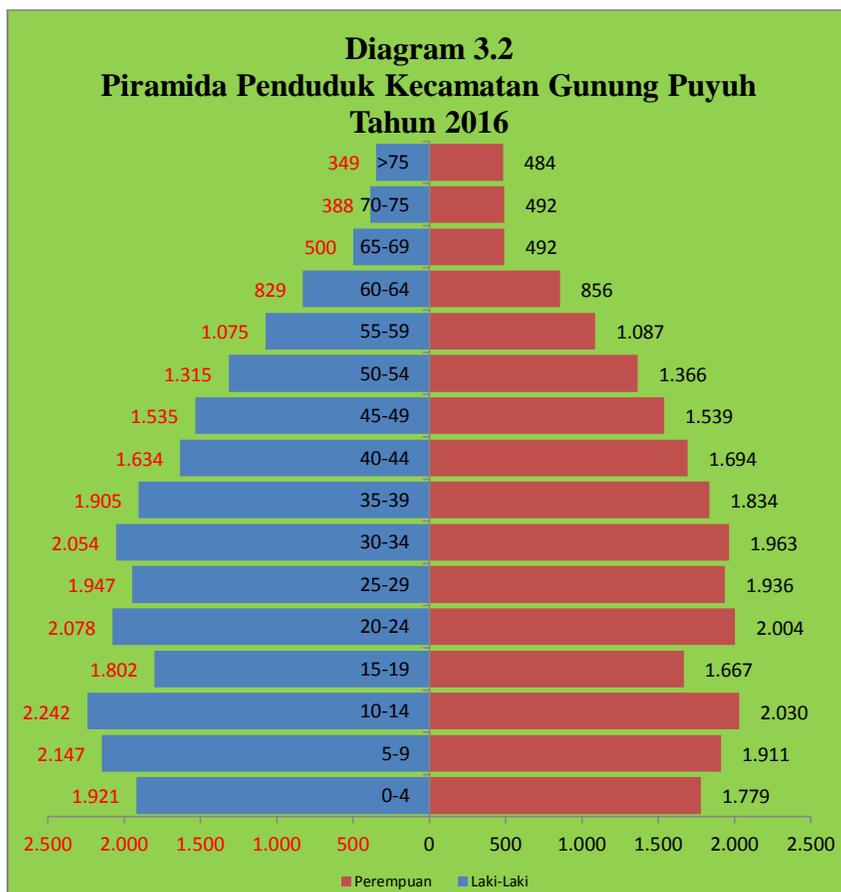
Dengan piramida ini, nampak jelas badan piramida menggelembung di tengah yang berarti bahwa penduduk Kota Sukabumi adalah penduduk produktif.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci per kecamatan, akan disajikan tabel dan piramidanya.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.921	8,10	1.779	7,69	3.700	7,90	107,98
5-9	2.147	9,05	1.911	8,26	4.058	8,66	112,35
10-14	2.242	9,45	2.030	8,77	4.272	9,12	110,44
15-19	1.802	7,60	1.667	7,21	3.469	7,40	108,10
20-24	2.078	8,76	2.004	8,66	4.082	8,71	103,69
25-29	1.947	8,21	1.936	8,37	3.883	8,29	100,57
30-34	2.054	8,66	1.963	8,49	4.017	8,57	104,64
35-39	1.905	8,03	1.834	7,93	3.739	7,98	103,87
40-44	1.634	6,89	1.694	7,32	3.328	7,10	96,46
45-49	1.535	6,47	1.539	6,65	3.074	6,56	99,74
50-54	1.315	5,54	1.366	5,90	2.681	5,72	96,27
55-59	1.075	4,53	1.087	4,70	2.162	4,61	98,90
60-64	829	3,49	856	3,70	1.685	3,60	96,85
65-69	500	2,11	492	2,13	992	2,12	101,63
70-75	388	1,64	492	2,13	880	1,88	78,86
>75	349	1,47	484	2,09	833	1,78	72,11
JUMLAH	23.721	50,63	23.134	49,37	46.855	100	102,54

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



Jika kita lihat Tabel 3.7 dan Diagram 3.2 tergambar bahwa penduduk Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.272 jiwa (9,12%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.242 jiwa (9,45%) dan perempuan 2.030 jiwa (8,77%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 833 jiwa (1,78%) terdiri dari laki-laki sejumlah 349 jiwa (1,47%) dan perempuan 484 jiwa (2,09%).

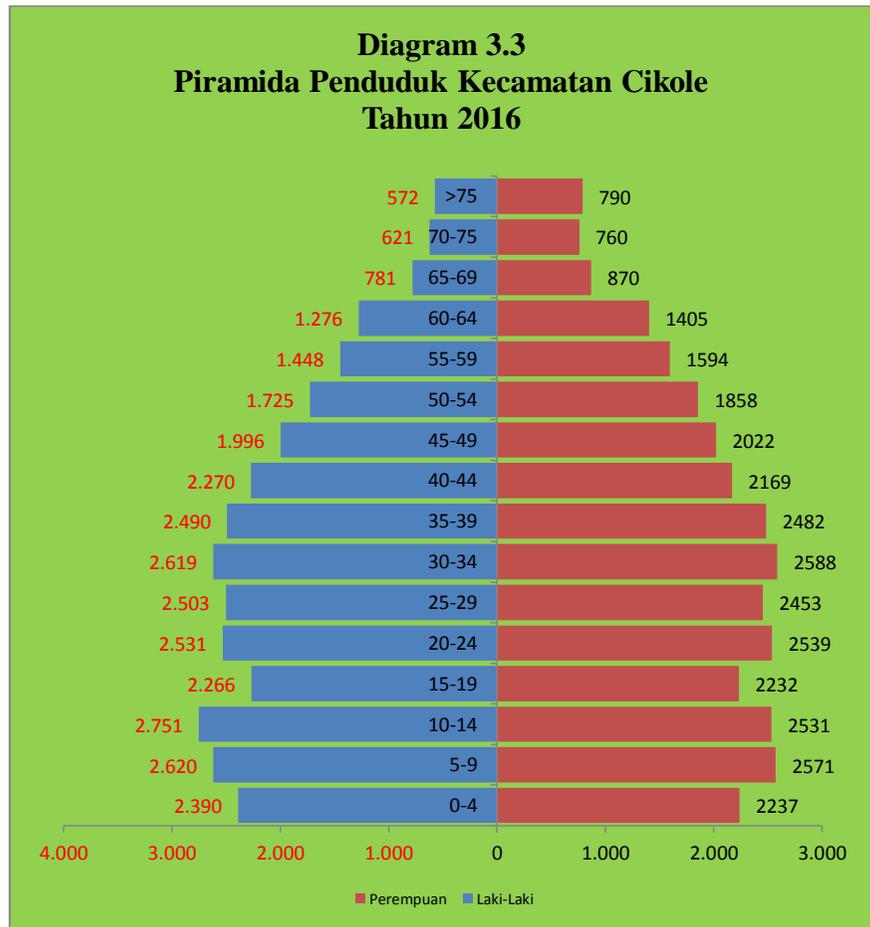
Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.237 jiwa (9,78%), sedangkan proporsi terkecil pada kelompok umur >75 tahun yaitu 749 jiwa (1,64%).

Pada umumnya penduduk Kecamatan Gunung Puyuh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, namun pada umur 60 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Kecamatan Cikole
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.390	7,74	2.237	7,19	4.627	7,47	106,84
5-9	2.620	8,49	2.571	8,27	5.191	8,38	101,91
10-14	2.751	8,91	2.531	8,14	5.282	8,52	108,69
15-19	2.266	7,34	2.232	7,18	4.498	7,26	101,52
20-24	2.531	8,20	2.539	8,16	5.070	8,18	99,68
25-29	2.503	8,11	2.453	7,89	4.956	8,00	102,04
30-34	2.619	8,49	2.588	8,32	5.207	8,40	101,20
35-39	2.490	8,07	2.482	7,98	4.972	8,02	100,32
40-44	2.270	7,36	2.169	6,97	4.439	7,16	104,66
45-49	1.996	6,47	2.022	6,50	4.018	6,48	98,71
50-54	1.725	5,59	1.858	5,97	3.583	5,78	92,84
55-59	1.448	4,69	1.594	5,13	3.042	4,91	90,84
60-64	1.276	4,13	1.405	4,52	2.681	4,33	90,82
65-69	781	2,53	870	2,80	1.651	2,66	89,77
70-75	621	2,01	760	2,44	1.381	2,23	81,71
>75	572	1,85	790	2,54	1.362	2,20	72,41
JUMLAH	30.859	49,80	31.101	50,20	61.960	100	99,22

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016.



Jika kita lihat Tabel 3.8 dan Diagram 3.3, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.282 jiwa (8,52%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.751 jiwa (8,91%) dan perempuan 2.531 jiwa (8,14%) sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 1.362 jiwa (2,20%) terdiri dari laki-laki 572 jiwa (1,85%) dan perempuan 790 jiwa (2,54%).

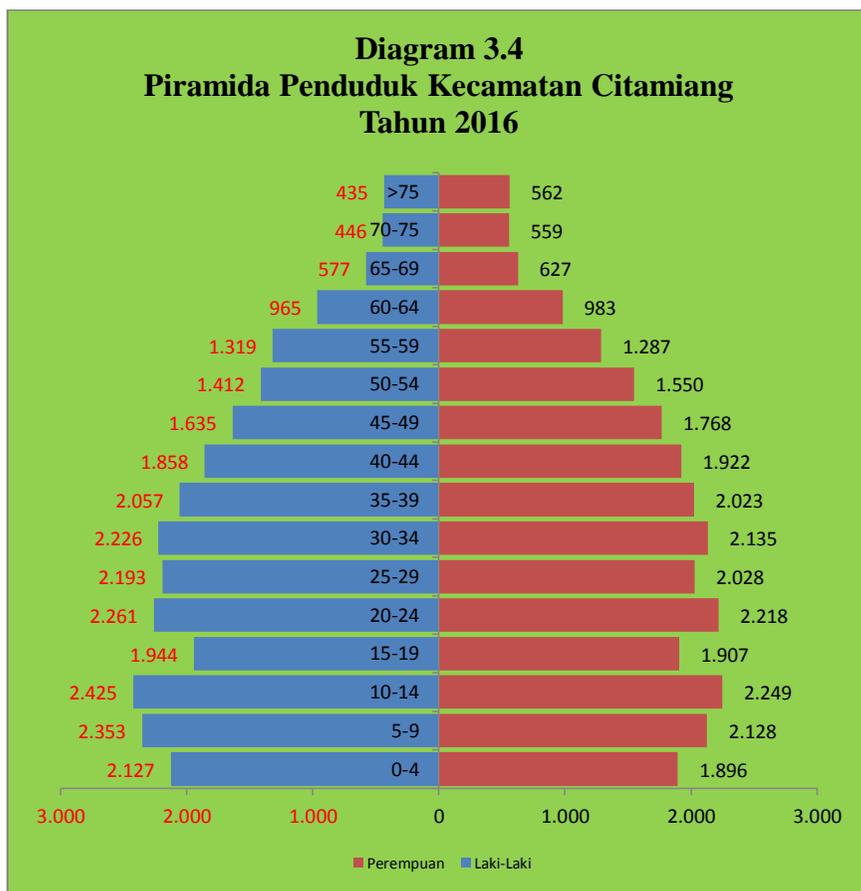
Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 5.222 jiwa (8,63%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.622 jiwa (8,70%) dan perempuan 2.600 jiwa (8,57%).

Kecamatan Cikole satu-satunya kecamatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 30.859 jiwa (49,80%) dan perempuan sebanyak 31.101 jiwa (50,20%).

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Kecamatan Citamiang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.127	8,11	1.896	7,34	4.023	7,73	112,18
5-9	2.353	8,97	2.128	8,23	4.481	8,60	110,57
10-14	2.425	9,24	2.249	8,70	4.674	8,98	107,83
15-19	1.944	7,41	1.907	7,38	3.851	7,40	101,94
20-24	2.261	8,62	2.218	8,58	4.479	8,60	101,94
25-29	2.193	8,36	2.028	7,85	4.221	8,11	108,14
30-34	2.226	8,49	2.135	8,26	4.361	8,37	104,26
35-39	2.057	7,84	2.023	7,83	4.080	7,83	101,68
40-44	1.858	7,08	1.922	7,44	3.780	7,26	96,67
45-49	1.635	6,23	1.768	6,84	3.403	6,53	92,48
50-54	1.412	5,38	1.550	6,00	2.962	5,69	91,10
55-59	1.319	5,03	1.287	4,98	2.606	5,00	102,49
60-64	965	3,68	983	3,80	1.948	3,74	98,17
65-69	577	2,20	627	2,43	1.204	2,31	92,03
70-75	446	1,70	559	2,16	1.005	1,93	79,79
>75	435	1,66	562	2,17	997	1,91	77,40
JUMLAH	26.233	50,38	25.842	49,62	52.075	100	101,51

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



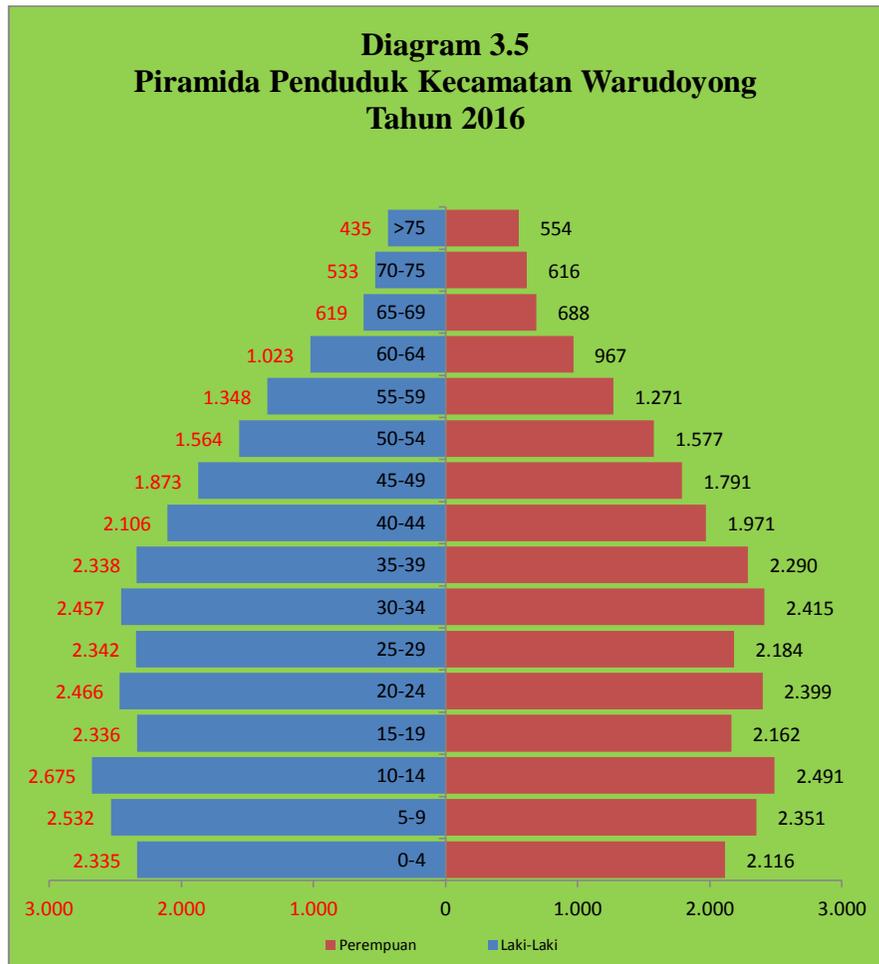
Jika kita lihat Tabel 3.9 dan Diagram 3.4, bahwa penduduk Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.674 jiwa (8,98%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.425 jiwa (9,25%) dan perempuan 2.249 jiwa (8,70%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 997 jiwa (1,91%) terdiri dari laki-laki 435 jiwa (1,66%) dan perempuan 562 jiwa (1,91%).

Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 4.700 jiwa (9,23%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.414 jiwa (9,45%) dan perempuan 2.286 jiwa (9,08%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 832 jiwa (1,64%) terdiri dari laki-laki 360 jiwa (1,41%) dan perempuan 472 jiwa (1,87%).

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Kecamatan Warudoyong
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	2.335	8,06	2.116	7,60	4.451	7,83	110,35
5-9	2.532	8,74	2.351	8,44	4.883	8,59	107,70
10-14	2.675	9,23	2.491	8,95	5.166	9,09	107,39
15-19	2.336	8,06	2.162	7,76	4.498	7,92	108,05
20-24	2.466	8,51	2.399	8,62	4.865	8,56	102,79
25-29	2.342	8,08	2.184	7,84	4.526	7,96	107,23
30-34	2.457	8,48	2.415	8,67	4.872	8,57	101,74
35-39	2.338	8,07	2.290	8,22	4.628	8,14	102,10
40-44	2.106	7,27	1.971	7,08	4.077	7,17	106,85
45-49	1.873	6,46	1.791	6,43	3.664	6,45	104,58
50-54	1.564	5,40	1.577	5,66	3.141	5,53	99,18
55-59	1.348	4,65	1.271	4,56	2.619	4,61	106,06
60-64	1.023	3,53	967	3,47	1.990	3,50	105,79
65-69	619	2,14	688	2,47	1.307	2,30	89,97
70-75	533	1,84	616	2,21	1.149	2,02	86,53
>75	435	1,50	554	1,99	989	1,74	78,52
JUMLAH	28.982	51,00	27.843	49,00	56.825	100	104,09

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



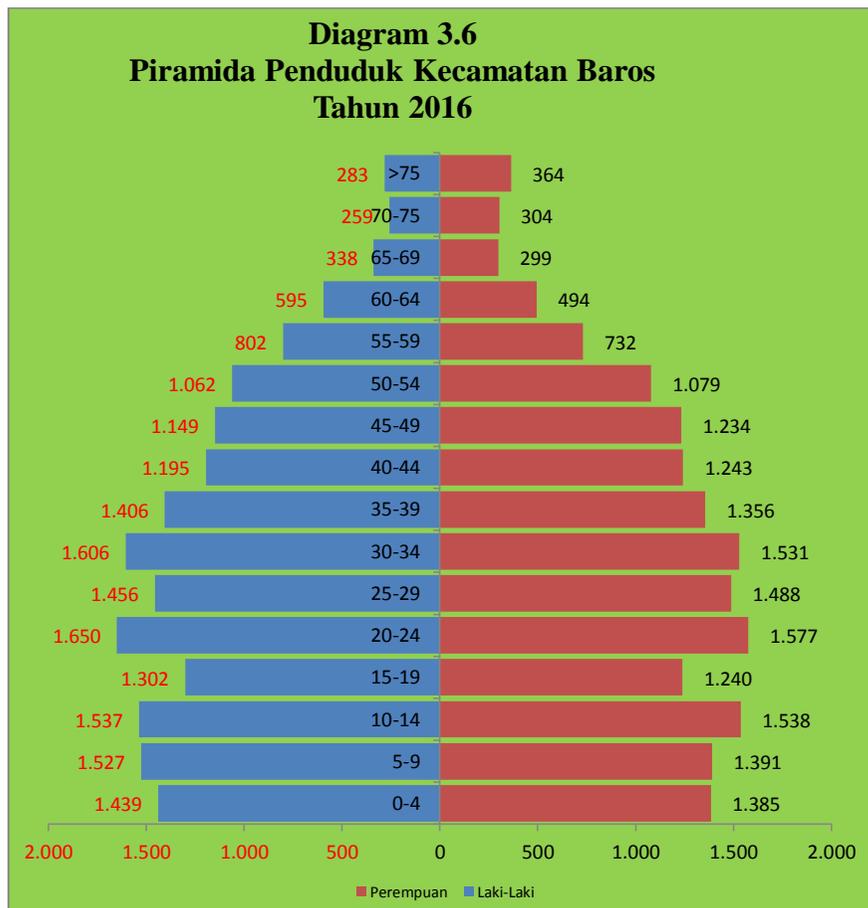
Jika kita lihat Tabel 3.10 dan Diagram 3.5, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.166 jiwa (9,09%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.675 jiwa (9,23%) dan perempuan 2.491 jiwa (8,95%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 989 jiwa (1,74%) terdiri dari laki-laki 435 jiwa (1,50%) dan perempuan 554 jiwa (1,99%).

Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 5.191 jiwa (9,41%) terdiri dari laki-laki sebanyak 2.711 jiwa (9,61%) dan perempuan 2.480 jiwa (9,21%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 842 jiwa (1,53%) terdiri dari laki-laki 372 jiwa (1,32%) dan perempuan 470 jiwa (1,74%).

Tabel 3.11
Jumlah Penduduk Kecamatan Baros
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.439	8,17	1.385	8,03	2.824	8,10	103,90
5-9	1.527	8,67	1.391	8,06	2.918	8,37	109,78
10-14	1.537	8,73	1.538	8,91	3.075	8,82	99,93
15-19	1.302	7,40	1.240	7,19	2.542	7,29	105,00
20-24	1.650	9,37	1.577	9,14	3.227	9,26	104,63
25-29	1.456	8,27	1.488	8,62	2.944	8,44	97,85
30-34	1.606	9,12	1.531	8,87	3.137	9,00	104,90
35-39	1.406	7,99	1.356	7,86	2.762	7,92	103,69
40-44	1.195	6,79	1.243	7,20	2.438	6,99	96,14
45-49	1.149	6,53	1.234	7,15	2.383	6,84	93,11
50-54	1.062	6,03	1.079	6,25	2.141	6,14	98,42
55-59	802	4,56	732	4,24	1.534	4,40	109,56
60-64	595	3,38	494	2,86	1.089	3,12	120,45
65-69	338	1,92	299	1,73	637	1,83	113,04
70-75	259	1,47	304	1,76	563	1,61	85,20
>75	283	1,61	364	2,11	647	1,86	77,75
JUMLAH	17.606	50,50	17.255	49,50	34.861	100	102,03

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



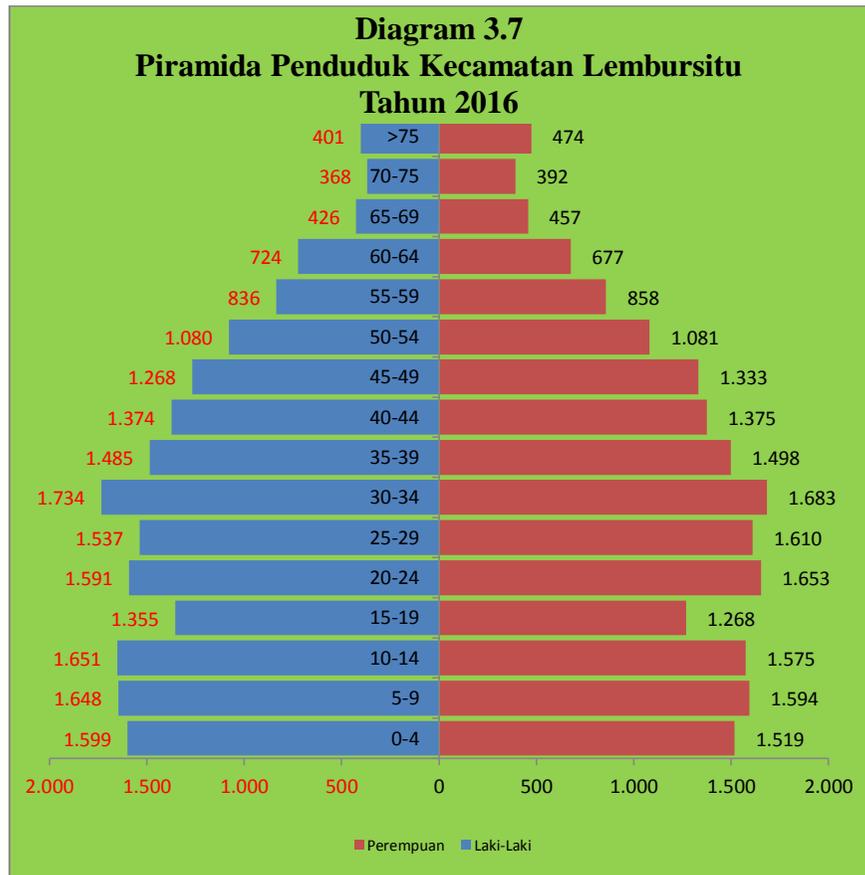
Jika kita lihat Tabel 3.11 dan Diagram 3.6, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu 3.227 jiwa (9,26%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.650 jiwa (9,37%) dan perempuan 1.577 jiwa (9,14%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 647 jiwa (1,86%) terdiri dari laki-laki 283 jiwa (1,61%) dan perempuan 364 jiwa (2,11%).

Proporsi tersebut berbeda dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.130 jiwa (9,34%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.537 jiwa (9,06%) dan perempuan 1.593 jiwa (9,63%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 526 jiwa (1,57%) terdiri dari laki-laki 226 jiwa (1,33%) dan perempuan 300 jiwa (1,81%).

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Kecamatan Lembursitu
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.599	8,38	1.519	7,98	3.118	8,18	105,27
5-9	1.648	8,64	1.594	8,37	3.242	8,50	103,39
10-14	1.651	8,65	1.575	8,27	3.226	8,46	104,83
15-19	1.355	7,10	1.268	6,66	2.623	6,88	106,86
20-24	1.591	8,34	1.653	8,68	3.244	8,51	96,25
25-29	1.537	8,06	1.610	8,45	3.147	8,25	95,47
30-34	1.734	9,09	1.683	8,84	3.417	8,96	103,03
35-39	1.485	7,78	1.498	7,86	2.983	7,82	99,13
40-44	1.374	7,20	1.375	7,22	2.749	7,21	99,93
45-49	1.268	6,65	1.333	7,00	2.601	6,82	95,12
50-54	1.080	5,66	1.081	5,68	2.161	5,67	99,91
55-59	836	4,38	858	4,50	1.694	4,44	97,44
60-64	724	3,80	677	3,55	1.401	3,67	106,94
65-69	426	2,23	457	2,40	883	2,32	93,22
70-75	368	1,93	392	2,06	760	1,99	93,88
>75	401	2,10	474	2,49	875	2,30	84,60
JUMLAH	19.077	50,04	19.047	49,96	38.124	100	100,16

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



Jika kita lihat Tabel 3.12 dan Diagram 3.7, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 3.417 jiwa (8,96%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.734 jiwa (9,09%) dan perempuan 1.683 jiwa (8,84%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 875 jiwa (2,30%) terdiri dari laki-laki 401 jiwa (2,10%) dan perempuan 474 jiwa (2,49%).

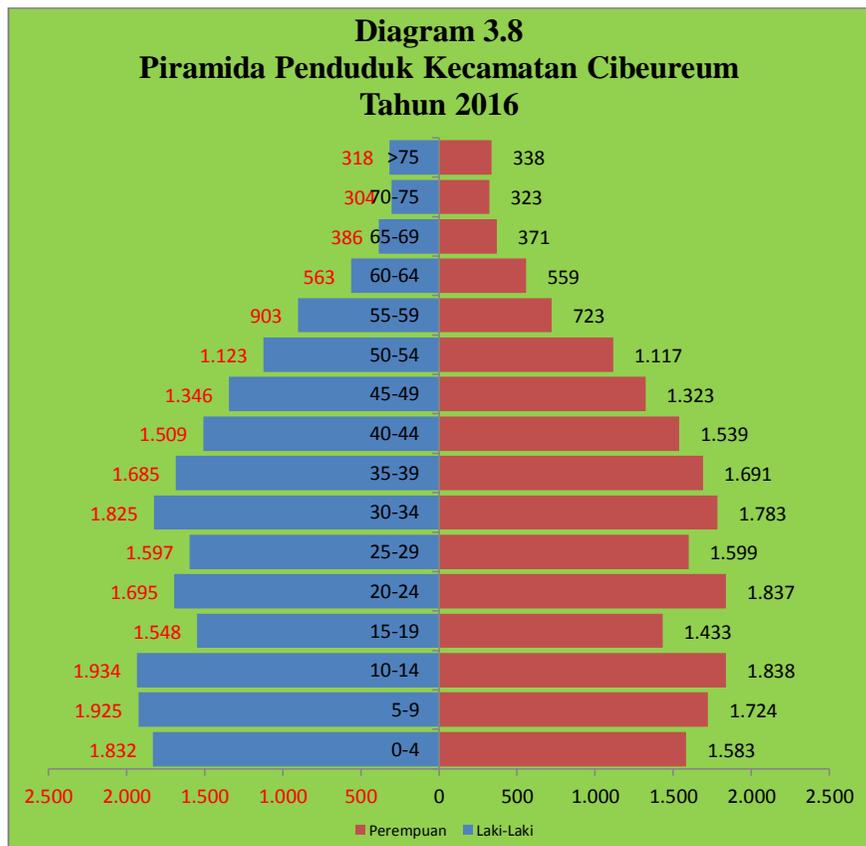
Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 3.264 jiwa (8,79%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.654 jiwa (8,89%) dan perempuan 1.610 jiwa (8,69%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 772 jiwa (2,08%) terdiri dari laki-laki 350 jiwa (1,88%) dan perempuan 422 jiwa (2,28%).

Tabel 3.13

**Jumlah Penduduk Kecamatan Cibureum
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Golongan Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				L & P		Rasio Jenis Kelamin
	L	%	P	%	Jumlah	%	
0-4	1.832	8,94	1.583	8,00	3.415	8,48	115,73
5-9	1.925	9,39	1.724	8,72	3.649	9,06	111,66
10-14	1.934	9,44	1.838	9,29	3.772	9,37	105,22
15-19	1.548	7,55	1.433	7,24	2.981	7,40	108,03
20-24	1.695	8,27	1.837	9,29	3.532	8,77	92,27
25-29	1.597	7,79	1.599	8,08	3.196	7,94	99,87
30-34	1.825	8,91	1.783	9,01	3.608	8,96	102,36
35-39	1.685	8,22	1.691	8,55	3.376	8,38	99,65
40-44	1.509	7,36	1.539	7,78	3.048	7,57	98,05
45-49	1.346	6,57	1.323	6,69	2.669	6,63	101,74
50-54	1.123	5,48	1.117	5,65	2.240	5,56	100,54
55-59	903	4,41	723	3,66	1.626	4,04	124,90
60-64	563	2,75	559	2,83	1.122	2,79	100,72
65-69	386	1,88	371	1,88	757	1,88	104,04
70-75	304	1,48	323	1,63	627	1,56	94,12
>75	318	1,55	338	1,71	656	1,63	94,08
JUMLAH	20.493	50,88	19.781	49,12	40.274	100	103,60

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



Jika kita lihat Tabel 3.13 dan Diagram 3.8, tergambar bahwa penduduk Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2016, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.772 jiwa (9,37%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.934 jiwa (9,44%) dan perempuan 1.838 jiwa (9,29%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 656 jiwa (1,63%) terdiri dari laki-laki 318 jiwa (1,55%) dan perempuan 338 jiwa (1,63%).

Proporsi tersebut masih sama dengan Tahun 2015, proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu 3.800 jiwa (9,82%) terdiri dari laki-laki sebanyak 1.966 jiwa (9,99%) dan perempuan 1.834 jiwa (9,66%), sedangkan proporsi terkecil berada pada kelompok umur di atas 75 tahun yaitu 533 jiwa (1,38%) terdiri dari laki-laki 262 jiwa (1,33%) dan perempuan 271 jiwa (1,43%).

3.2.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk. Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu informasi rasio jenis kelamin ini juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Rasio Jenis Kelamin dinyatakan dalam rumus :

$$Sex\ Ratio = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Laki-laki}{Jumlah\ Penduduk\ Perempuan} \times 100$$

Sex Ratio Kota Sukabumi Tahun 2016 dapat kita lihat dalam Tabel 3.6 yaitu 101,81 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki. Keadaan tersebut berbeda dengan *Sex Ratio* Tahun 2015

yaitu 102,07 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.

Sex Rasio per kecamatan Tahun 2016 :

- ❖ *Sex Ratio* Penduduk Kecamatan Gunung Puyuh adalah 102,54

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Gunung Puyuh terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cikole adalah 99,22

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cikole terdapat 99 s.d 100 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Citamiang adalah 101,51

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Citamiang terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Warudoyong adalah 104,09

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Warudoyong terdapat 104 s.d 105 penduduk laki-laki

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Baros adalah 102,03

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Baros terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Lembursitu adalah 100,16

Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Lembursitu terdapat 100 s.d 101 penduduk laki-laki.

- ❖ *Sex Ratio* penduduk Kecamatan Cibeureum adalah 103,60
Hal ini berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Cibeureum terdapat 103 s.d 104 penduduk laki-laki.

3.2.3. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Untuk mengetahui rasio ketergantungan, jumlah penduduk yang ada dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok umur yaitu :

1. Penduduk Muda (0-14 Tahun), dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua atau orang lain.
2. Penduduk Tua (65 tahun ke atas), dianggap sudah tidak produktif lagi.
3. Penduduk Usia Kerja/Produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun (muda), ditambah dengan penduduk berumur 65 tahun keatas (tua) dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 15 -64 tahun. Rasio ini dapat dilihat berdasarkan umur yakni rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan ini dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah secara kasar.

Negara-negara yang sedang berkembang dengan angka fertilitas tinggi akan mempunyai angka beban tanggungan yang tinggi pula, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak di dalam penduduk tersebut.

Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2016 dapat disajikan rasio ketergantungan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	DR
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GUNUNG PUYUH				45,87
	0 - 14 (Muda)	6.310	5.720	12.030	
	15 - 64 (Produktif)	16.174	15.946	32.120	
	>65 (Tua)	1.237	1.468	2.705	
2	CIKOLE				45,90
	0 - 14 (Muda)	7.761	7.339	15.100	
	15 - 64 (Produktif)	21.124	21.342	42.466	
	>65 (Tua)	1.974	2.420	4.394	
3	CITAMIANG				45,91
	0 - 14 (Muda)	6.905	6.273	13.178	
	15 - 64 (Produktif)	17.870	17.821	35.691	
	>65 (Tua)	1.458	1.748	3.206	
4	WARUDOYONG				46,15
	0 - 14 (Muda)	7.542	6.958	14.500	
	15 - 64 (Produktif)	19.853	19.027	38.880	
	>65 (Tua)	1.587	1.858	3.445	
5	BAROS				44,07
	0 - 14 (Muda)	4.503	4.314	8.817	
	15 - 64 (Produktif)	12.223	11.974	24.197	
	>65 (Tua)	880	967	1.847	
6	LEMBURSITU				46,52
	0 - 14 (Muda)	4.898	4.688	9.586	
	15 - 64 (Produktif)	12.984	13.036	26.020	
	>65 (Tua)	1.195	1.323	2.518	

7	CIBEUREUM				47,00
	0 - 14 (Muda)	5.691	5.145	10.836	
	15 - 64 (Produktif)	13.794	13.604	27.398	
	>65 (Tua)	1.008	1.032	2.040	
KOTA SUKABUMI					45,95
0 - 14 (Muda)		43.610	40.437	84.047	
15 - 64 (Produktif)		114.022	112.750	226.772	
>65 (Tua)		9.339	10.816	20.155	

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Rumus Depedensi Ratio :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Muda} + \text{Jumlah Penduduk Tua}}{\text{Jumlah Penduduk PProduktif}} \times k$$

Dari Tabel 3.14 di atas bisa kita lihat angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 sebesar :

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k \\ &= \frac{84.047 + 20.155}{226.772} \times 100 \\ &= 45,95 \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa tiap 100 orang produktif harus menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif. Hal ini masih sama dengan keadaan Rasio Ketergantungan Tahun 2015.

Angka Ketergantungan Penduduk (DR) per Kecamatan Tahun 2016 :

❖ Kecamatan Gunung Puyuh

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{12.030 + 2.705}{32.120} \times 100$$

$$= 45.87$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cikole

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{15.100 + 4.394}{42.466} \times 100$$

$$= 45,90$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Citamiang

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{13.178 + 3.206}{35.691} \times 100$$

$$= 45.91$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 45 s.d 46 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Warudoyong

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{14.500 + 3.445}{38.880} \times 100$$

$$= 46,15$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 46 s.d 47 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Baros

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{8.817 + 1.847}{24.197} \times 100$$

$$= 44,07$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 44 s.d 45 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Lembursitu

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{9.586 + 2.518}{26.020} \times 100$$

$$= 46,52$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 46 s.d 47 orang yang tidak produktif.

❖ Kecamatan Cibeureum

$$\frac{\text{JumlahPendudukMuda} + \text{JumlahPendudukTua}}{\text{JumlahPendudukProduktif}} \times k$$

$$= \frac{10.836 + 2.040}{27.398} \times 100$$

$$= 47,00$$

Artinya bahwa tiap 100 orang produktif menanggung 47 s.d 48 orang yang tidak produktif.

Kecamatan yang mempunyai angka ketergantungan paling tinggi adalah Kecamatan Cibeureum. Hal ini disebabkan karena Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*) di Kecamatan Cibeureum cukup tinggi dibanding jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu 47,00% dan yang paling kecil rasio ketergantungannya adalah Kecamatan Baros yaitu 44,07%. Namun demikian angka ketergantungan penduduk Kota Sukabumi dari masing-masing kecamatan masih di bawah 50%.

3.3 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

3.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

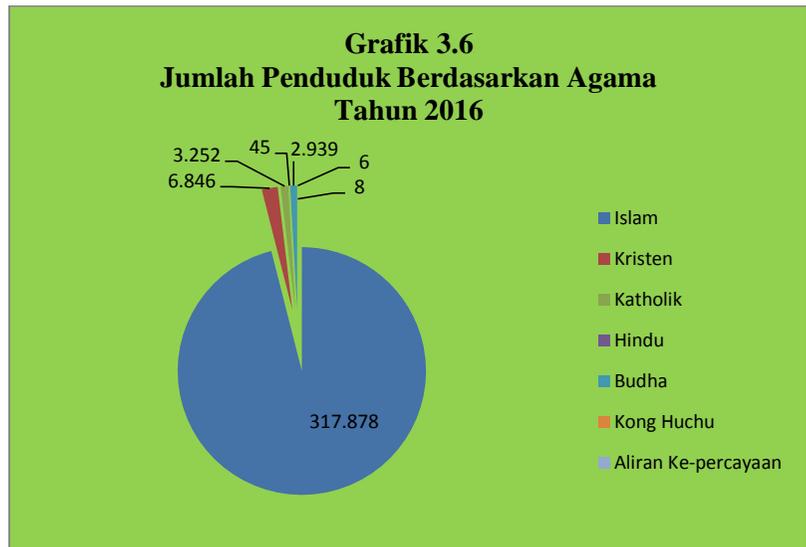
Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama. Pemerintah Kota Sukabumi dapat menyusun atau merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, atau program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan beragama.

Tabel 3.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	Islam	317.878	96,04
2	Kristen	6.846	2,07
3	Katholik	3.252	0,98
4	Hindu	45	0,01
5	Budha	2.939	0,89
6	Kong Huchu	6	0,00
7	Aliran Ke-percayaan	8	0,00
	JUMLAH	330.974	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016.

Pada Tabel 3.15 nampak bahwa dari jumlah penduduk Kota Sukabumi sebesar 330.974, sebanyak 317.878 atau 96,04% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,07%, Agama Katholik sebesar 0,98%, Agama Budha 0,89%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.



Komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk berdasarkan agama pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 308.638 atau 96,05% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2%, Agama Katholik sebesar 1%, Agama Budha 0,01%, disusul Agama Hindu sebesar 0,93%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.

Tabel 3.30
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PERSENTASI AGAMA (JIWA)														JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		ISLAM	%	KRISTEN	%	KATHOLIK		HINDU	%	BUDHA	%	KONG HUCU	%	KEPER CAYAAN	%	
1	GUNUNG PUYUH	44.951	95,94	1.094	2,33	624	1,33	29	0,06	157	0,34	-	0	-	0	46.855
2	CIKOLE	56.977	91,96	2.131	3,44	1.358	2,19	8	0,01	1.473	2,38	5	0,008	8	0,01	61.960
3	CITAMIANG	50.477	96,93	876	1,68	365	0,70	1	0	356	0,68	-	0	-	0	52.075
4	WARUDUYONG	54.562	96,02	995	1,75	418	0,74	1	0,002	848	1,49	1	0,002	-	0	56.825
5	BAROS	33.919	97,30	740	2,12	196	0,56	-	0	6	0,02	-	0	-	0	34.861
6	LEMBURSITU	37.881	99,36	192	0,50	42	0,11	-	0	9	0,02	-	0	-	0	38.124
7	CIBEUREUM	39.111	97,11	818	2,03	249	0,62	6	0,01	90	0,22	-	0	-	0	40.274
	JUMLAH	317.878	96,04	6.846	2,07	3.252	0,98	45	0,01	2.939	0,89	6	0,002	8	0,002	330.974

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

Pada Tabel 3.16 di atas, nampak bahwa :

- ❖ Penduduk yang beragama Islam prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Lembursitu (99,36%), baru disusul Kecamatan Baros (97,30%), lalu Kecamatan Cibereum (97,11%).
- ❖ Penduduk yang beragama Kristen prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (3,44%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (2,33%), lalu Kecamatan Baros (2,12%).
- ❖ Penduduk yang beragama Khatolik prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (2,19%), baru disusul Kecamatan Gunung Puyuh (1,33%), lalu Kecamatan Warudoyong (0,74%).
- ❖ Penduduk yang beragama Hindu prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Gunung Puyuh (0,06%), baru disusul Kecamatan Cikole (0,01%), lalu Kecamatan Warudoyong (0,002%).
- ❖ Penduduk yang beragama Budha prosentasi paling banyak berada di Kecamatan Cikole (2,38%), baru disusul Kecamatan Warudoyong (1,49%), lalu Kecamatan Citamiang (0,68%).

3.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Jenjang pendidikan yang digambarkan dalam Tabel 3.17 di bawah ini dapat menggambarkan secara kasar tingkat pendidikan penduduk Kota Sukabumi, namun belum bisa menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, karena jumlah yang digambarkan belum bisa diperinci per kelompok umur.

Tabel 3.31
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	
1	GUNUNG PUYUH	8.502	4.701	8.592	7.415	13.136	563	1.205	2.511	222	8	46.855
2	CIKOLE	10.517	5.084	11.955	9.516	18.433	712	1.765	3.660	302	16	61.960
3	CITAMIANG	9.673	4.708	11.263	8.393	14.045	491	983	2.304	203	12	52.075
4	WARUDOYONG	8.927	6.143	13.454	8.840	16.031	400	959	1.923	142	6	56.825
5	BAROS	5.885	3.508	9.641	5.182	8.092	315	624	1.446	163	5	34.861
6	LEMBURSITU	6.584	3.898	12.784	5.451	7.437	265	401	1.208	94	2	38.124
7	CIBEUREUM	6.990	4.186	12.102	5.609	8.316	333	777	1.803	149	9	40.274
	JUMLAH	57.078	32.228	79.791	50.406	85.490	3.079	6.714	14.855	1.275	58	330.974

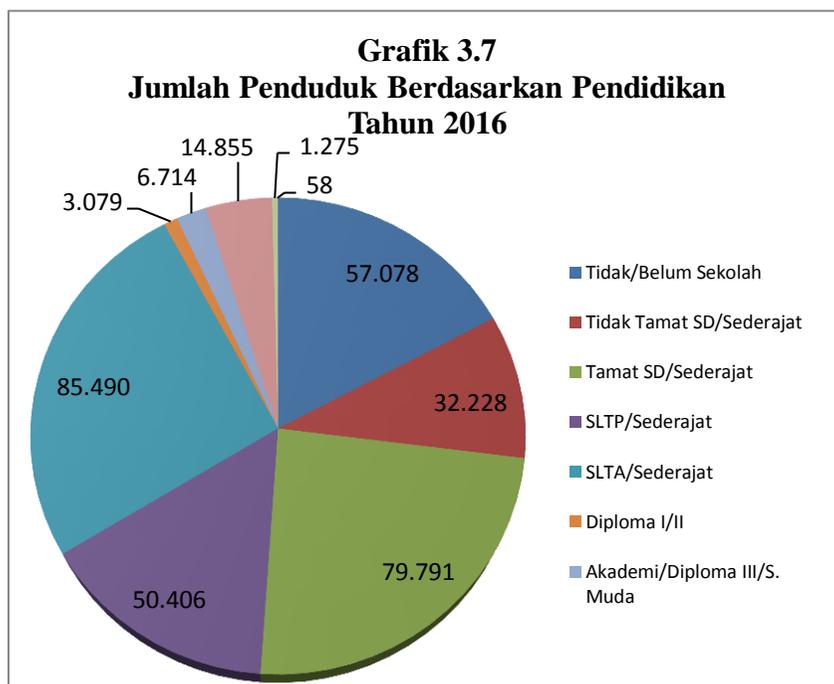
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

Tabel 3.18

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JIWA	%
1	Tidak/Belum Sekolah	57.078	17,25
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	32.228	9,74
3	Tamat SD/Sederajat	79.791	24,11
4	SLTP/Sederajat	50.406	15,23
5	SLTA/Sederajat	85.490	25,83
6	Diploma I/II	3.079	0,93
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	6.714	2,03
8	Diploma IV/Strata I	14.855	4,49
9	Strata II	1.275	0,39
10	Strata III	58	0,02
JUMLAH		330.974	100

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016



Jika kita lihat Tabel 3.18, nampak bahwa penduduk per kecamatan yang tidak/belum sekolah s.d jenjang pendidikan Strata III, terkonsentrasi di Kecamatan Cikole dan disusul Kecamatan Warudoyong menduduki rangking kedua dibanding dengan kecamatan lain.

Dari Tabel 3.18 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Sukabumi yang tidak/belum sekolah sebesar 57.078 jiwa (17,25%) dari 330.974 jiwa. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya anak-anak yang belum berusia sekolah maupun penduduk yang memang benar-benar tidak pernah sekolah.

Penduduk Kota Sukabumi yang tidak tamat SD/ sederajat sejumlah 32.228 jiwa (9,74%) dari 330.974 jiwa. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya orang-orang/anak-anak yang putus sekolah/drop out SD maupun anak-anak yang berusia SD tapi belum lulus/tamat.

Proporsi terbesar berada pada tingkat pendidikan Tamat SLTA/ sederajat yaitu 85.490 jiwa (25,83%), lalu tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu 79.791 jiwa (24,11%), kemudian tingkat pendidikan SLTP/ sederajat yaitu 50.406 jiwa (15,23%). Selanjutnya proporsi terkecil pada jenjang Strata III sebanyak 58 jiwa (0,02%).

Untuk menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai jenjang pendidikan penduduk di Kota Sukabumi, dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.34
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Menurut Usia

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)									
		Tidak/ Belum Sekolah	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%	SLTA/ Sederajat	%
1	0-14	55.302	16,71	23.177	7,00	4.693	1,42	862	0,26	13	0,00
2	15-64	1.407	0,43	7.873	2,38	63.278	19,12	46.943	14,18	82.131	24,81
3	>64	369	0,11	1.178	0,36	11.820	3,57	2.601	0,79	3.346	1,01
JUMLAH		57.078	17,25	32.228	9,74	79.791	24,11	50.406	15,23	85.490	25,83

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		Diploma I/II	%	Akademi/ Diploma III/S. Muda	%	Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%	
1	0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.047
2	15-64	2.926	0,88	6.417	1,94	14.524	4,39	1.220	0,37	53	0,02	226.772
3	>64	153	0,05	297	0,09	331	0,10	55	0,02	5	0,00	20.155
JUMLAH		3.079	0,93	6.714	2,03	14.855	4,49	1.275	0,39	58	0,02	330.974

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

Tabel 3.35
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Rendah

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)							
		Tidak/ Belum Sekolah	%	Tidak Tamat SD/ Sederajat	%	Tamat SD/ Sederajat	%	SLTP/ Sederajat	%
1	15-19	925	0,29	4.577	1,42	5.739	1,79	8.730	2,72
2	20-24	104	0,03	1.371	0,43	4.386	1,36	7.371	2,29
3	25-29	49	0,02	125	0,04	4.358	1,36	5.602	1,74
4	30-34	32	0,01	148	0,05	5.783	1,80	5.588	1,74
5	35-39	38	0,01	155	0,05	6.729	2,09	4.672	1,45
6	40-44	40	0,01	187	0,06	7.443	2,32	4.464	1,39
7	45-49	46	0,01	225	0,07	7.329	2,28	3.665	1,14
8	50-54	55	0,02	331	0,10	7.848	2,44	2.762	0,86
9	55-59	58	0,02	416	0,13	7.534	2,34	2.201	0,68
10	60-64	60	0,02	338	0,11	6.129	1,91	1.888	0,59
JUMLAH		1.407	0,44	7.873	2,45	63.278	19,69	46.943	14,61

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

Tabel 3.36
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) dengan Pendidikan Tinggi

NO	USIA	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)					
		Diploma IV/Strata I	%	Strata II	%	Strata III	%
1	15-19	2	0,00	1	0,00		0,00
2	20-24	631	0,20	1	0,00	1	0,00
3	25-29	2.396	0,75	55	0,02	4	0,00
4	30-34	2.780	0,87	102	0,03	4	0,00
5	35-39	2.561	0,80	138	0,04	6	0,00
6	40-44	1.837	0,57	183	0,06	5	0,00
7	45-49	1.605	0,50	223	0,07	1	0,00
8	50-54	1.434	0,45	233	0,07	7	0,00
9	55-59	905	0,28	208	0,06	19	0,01
10	60-64	373	0,12	76	0,02	6	0,00
JUMLAH		14.524	4,52	1.220	0,38	53	0,02

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

3.4 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan sebagai alat bukti autentik seseorang atau pemiliknya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pelayanan publik baik pemerintahan atau swasta seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dokumen kependudukan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap penduduk sesuai dengan domisilinya dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan status sipil sebagai warga negara yang juga merupakan penertiban administrasi kependudukan sebagai bahan updating database kependudukan yang valid, akurat dan dinamis untuk digunakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Adapun dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang, dan Akta-Akta Pencatatan Sipil (seperti: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan lain-lain).

3.4.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga, dan merupakan dokumen awal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KK	
					ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	46.855	13.683	3,42	12.480	91,21
2	CIKOLE	61.960	18.768	3,30	17.710	94,36
3	CITAMIANG	52.075	15.499	3,36	14.240	91,88
4	WARUDOYONG	56.825	16.850	3,37	15.663	92,96
5	BAROS	34.861	10.298	3,39	9.379	91,08
6	LEMBURSITU	38.124	11.949	3,19	11.206	93,78
7	CIBEUREUM	40.274	11.589	3,48	10.919	94,22
	JUMLAH	330.974	98.636	3,36	91.597	92,86

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Dari Tabel 3.22 pada Tahun 2016 terlihat bahwa kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Sukabumi sebanyak 91.597 (92,86%) dari jumlah 98.636 Kepala Keluarga. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 kepemilikan KK sebanyak 88.055 (94,55%) dari jumlah 93.140 Kepala Keluarga.

Ratio atau perbandingan Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3,36 menunjukkan setiap Kepala Keluarga rata-rata berisi 3-4 jiwa.

Secara kasar data ini bisa menggambarkan kondisi kepemilikan KK di Kota Sukabumi pada umumnya setiap Kepala Keluarga sudah mempunyai KK.

3.4.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai identitas diri. KTP-el ini wajib dimiliki oleh semua penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. KTP berfungsi untuk semua urusan yang berkaitan dengan legalitas, misalnya urusan dengan bank, mengurus perkawinan, mengurus sertifikat tanah, mengurus bantuan-bantuan dari pemerintah, dan lain-lain.

Tabel 3.23

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP-el

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK K (JIWA)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RASIO	KEPEMILIKAN KTP-el		
					WAJIB KTP-el	ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	46.855	13.683	3,42	32.979	30.898	93,69
2	CIKOLE	61.960	18.768	3,30	44.431	42.476	95,60
3	CITAMIANG	52.075	15.499	3,36	36.836	35.754	97,06
4	WARUDROYONG	56.825	16.850	3,37	39.755	36.650	92,19
5	BAROS	34.861	10.298	3,39	24.676	22.996	93,19
6	LEMBURSITU	38.124	11.949	3,19	27.178	26.536	97,64
7	CIBEUREUM	40.274	11.589	3,48	27.763	26.108	94,04
	JUMLAH	330.974	98.636	3,36	233.618	221.418	94,78

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Tabel 3.23 menunjukkan bahwa prosentasi kepemilikan KTP Tahun 2016 sebesar 221.418 orang dari wajib KTP sebanyak 233.618 orang, sedangkan prosentasi kepemilikan KTP pada tahun 2015 sebesar 212.488 orang dari wajib KTP sebanyak 228.205 orang.

Peningkatan tersebut merupakan upaya petugas dalam melaksanakan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling/jemput bola (jempol) pemukiman/anak sekolah/aki nini/perusahaan.

Dengan adanya perekaman KTP-el diharapkan data kependudukan akan lebih akurat dan terjamin ketunggalannya, sehingga tidak terjadi lagi penduduk memiliki KTP diberbagai tempat atau lebih dari satu KTP.

3.4.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting dan merupakan bukti status keperdataan seseorang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul seseorang, kapan dan dimana seseorang dilahirkan.

Tabel 3.24

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	46.855	42.687	93,52
2	CIKOLE	61.960	57.933	95,78
3	CITAMIANG	52.075	48.785	96,17
4	WARUDOYONG	56.825	51.834	94,00
5	BAROS	34.861	30.491	90,99
6	LEMBURSITU	38.124	36.589	98,53
7	CIBEUREUM	40.274	36.589	94,58
JUMLAH		330.974	304.908	94,89

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 304.908 jiwa (94,89%) dari jumlah penduduk sebanyak 330.974 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Citamiang sebanyak 36.589 jiwa (98,53%), sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Baros sebanyak 30.491 jiwa (90,99%).

Hal tersebut berbeda dengan kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015 sebanyak 296.446 jiwa (92,26%) dari jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Cikole sebesar 55.910 jiwa (92,44%), sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Cibeureum sebesar 35.549 jiwa (91,90%).

Tabel 3.25

**Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun
Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 Thn (JIWA)	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
			ADA	%
1	GUNUNG PUYUH	13.808	11.320	81,98
2	CIKOLE	17.496	13.190	75,39
3	CITAMIANG	15.227	12.529	82,28
4	WARUDOYONG	16.721	12.083	72,26
5	BAROS	10.093	7.131	70,65
6	LEMBURSITU	10.821	8.224	76,00
7	CIBEUREUM	12.326	9.656	78,34
JUMLAH		96.492	74.133	76,83

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Namun apabila dilihat pada Tabel 3.25 kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun masih terlihat rendah yaitu sebanyak 74.133 jiwa (76,83%). Hal tersebut dikarenakan pencatatan akta kelahiran yang diterbitkan sebelum tahun 2013 tidak menggunakan aplikasi SIAK, sehingga datanya tidak terekam dalam *Database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk itu dibutuhkan *updating* atau konversi data guna melengkapi biodata penduduk yang sudah ada dalam *Dabase* SIAK.

3.4.4 Kepemilikan Akta Perkawinan

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan, khusus untuk penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan kepada KUA Kecamatan.

Akta Perkawinan atau Surat Nikah merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang, apakah yang bersangkutan berstatus kawin, belum kawin, cerai mati, atau cerai hidup.

Namun tidak menuntut kemungkinan saat ini juga masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan perkawinannya tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

Bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinannya secara agama Islam dan tidak melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) saat itu, sehingga tidak memiliki keabsahan perkawinannya secara negara dalam artian tidak memiliki Surat Nikah. Untuk pasangan suami istri tersebut dapat mengajukan permohonan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.

Menyadari bahwa *Itsbat nikah* sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Surat Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (*gono-gini*).

Penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Agama dengan *itsbat nikah* mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel 3.26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNG PUYUH	22.254	12.946	9.308	5,82%
2	CIKOLE	29.299	13.881	15.418	4,74%
3	CITAMIANG	24.288	15.992	8.295	6,58%
4	WARUDYONG	26.622	10.582	16.039	3,98%
5	BAROS	16.535	5.619	10.916	3,40%
6	LEMBURSITU	19.321	7.453	11.868	3,86%
7	CIBEUREUM	19.104	8.080	11.025	4,23%
		157.423	74.554	82.869	47,36%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perkawinan menurut Umur Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
15-19	534	280	250	52,43%
20-24	6.793	3.448	3.318	50,76%
25-29	15.829	7.613	8.134	48,10%
30-34	22.411	10.857	11.445	48,44%
35-39	22.700	11.265	11.309	49,63%
40-44	20.846	10.390	10.350	49,84%
45-49	18.959	9.542	9.338	50,33%
50-54	16.149	7.730	8.354	47,87%
55-59	12.464	5.780	6.642	46,37%
60-64	9.066	3.914	5.114	43,17%
65-69	5.058	1.891	3.154	37,39%
70-74	3.417	1.054	2.348	30,85%
>=75	3.197	790	2.401	24,71%
	157.423	74.554	82.157	47,36%

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

3.4.5 Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian atau surat cerai merupakan legalitas hukum status perkawinan seseorang yang telah berpisah dengan pasangan perkawinan/pernikahannya.

Apabila kita cermati pada Tabel 3.28 di bawah ini, 856 (4,29%) dari sejumlah 19.967 penduduk Kota Sukabumi yang status perkawinannya cerai yang memiliki Akta Perceraian atau surat cerai. Hal tersebut dikarenakan banyak penduduk yang sudah bercerai/berpisah dengan pasangan hidupnya, akan tetapi tidak melaporkan peristiwa kependudukannya.

Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan
Akta Perceraian menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	%	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	GUNUNGPUYUH	2.740	433	15,80	2.295	83,76
2	CIKOLE	4.358	212	4,86	4.129	94,75
3	CITAMIANG	3.721	220	5,91	3.492	93,85
4	WARUDOYONG	3.725	86	2,31	3.596	96,54
5	BAROS	2.169	108	4,98	2.054	94,70
6	LEMBURSITU	2.519	107	4,25	2.396	95,12
7	CIBEUREUM	2.293	114	4,97	2.167	94,51
		21.525	1.280	5,95	20.129	93,51

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

4.1 Indikator Kesehatan

4.1.1 Kelahiran (*Fertilitas*)

Kelahiran (*Fertilitas*) merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

Tinggi rendahnya kelahiran dalam suatu penduduk erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya perkawinan, umur pada waktu kawin, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi. Kelahiran yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya adalah Lahir Mati.

Lahir Mati adalah kematian yang terjadi pada bayi yg dilahirkan (setelah cukup masanya umur kandungan 7 bulan atau lebih) tanpa ada tanda-tanda kehidupan.

Pada Tahun 2016 di Kota Sukabumi terdapat 6.145 Ibu Bersalin. Dari data tersebut dapat dihitung Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) dan Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*).

a. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka Kelahiran Kasar (*CBR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Rumusnya :

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Keterangan :

B = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu

(Berdasarkan data Dinkes, Jumlah Kelahiran tahun 2013 adalah 7.304)

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

(Berdasarkan SIAK, Jumlah Penduduk Bulan Desember 2013 adalah 342.086)

k = 1000

CBR Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah :

$$6.145 / 330.974 \times 1000 = 18,57$$

Angka ini mengandung arti bahwa dari 1000 penduduk terjadi kelahiran 19 kelahiran.

b. Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*) menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi (15 - 49 tahun) dalam suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$GFR = \frac{B}{Pf (15 - 49)} \times k$$

Keterangan:

B = Jumlah Kelahiran

Pf (15-49) = Jumlah Wanita umur 15 – 49 Tahun

k = 1000

GFR Kota Sukabumi pada Tahun 2016 adalah :

$$\frac{6.145}{89.629} \times 1000 = 69$$

Angka ini menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15 - 49 tahun terdapat 69 kelahiran.

c. Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Yang dimaksud Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.

Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur (*ASFR*). Dalam buku ini *TFR* belum bisa disajikan karena data banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur belum bisa diketahui.

4.1.2 Kematian (*Mortalitas*)

Kematian (*Mortalitas*) merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk.

Kematian seseorang dalam suatu penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tinggi rendahnya angka kematian akan dipengaruhi oleh struktur umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi serta keadaan lingkungan dimana mereka berada (misalnya taraf hidup dan perawatan kesehatan).

a. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tertentu.

b. Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*)

Angka Kematian menurut Umur (*Age Specific Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama.

Angka ini sebenarnya bisa menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan kematian kasar, akan tetapi di dalam buku ini belum bisa disajikan karena data banyaknya kematian menurut umur yang berada dalam kelompok umur belum ada.

c. Angka Kematian Ibu/AKI (*Maternal Mortality Rate*)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang menentukan Indeks Kesehatan dalam

menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Kematian ibu pada tahun 2016 berjumlah 6 (enam) orang. 1 (satu) kasus kematian diantaranya terjadi di fasilitas rujukan (Rumah Sakit) dan 5 (Lima) kasus kematian terjadi di rumah (pasca rawat). Capaian ini termasuk kedalam kategori baik, mengingat Angka Kematian Ibu tahun 2016 ini masih dibawah target nasional. Target kematian ibu nasional (2019) adalah sebesar 306/100.000 Kelahiran Hidup. Apabila dikonversikan kedalam Angka Kematian Ibu dengan jumlah Kelahiran Hidup sebanyak 6.145, maka Angka Kematian Ibu di Kota Sukabumi adalah sebesar 97/100.000 Kelahiran Hidup. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, dari 127/100.000 kelahiran hidup menjadi 97/100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan wilayah kerja Kecamatan, kematian ibu menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Wilayah Kerja Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU									
			IBU HAMIL			IBU BERSALIN			IBU NIFAS			
			< 20 th	20-34 th	≥35 th	< 20 th	20-34 th	≥35 th	< 20 th	20-34 th	≥35 th	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	
1	BAROS	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LEMBURSITU	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CIBEUREUM	765	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	CITAMIANG	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	WARUDOYONG	1,073	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	GUNUNG PUYUH	808	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
14	CIKOLE	1,091	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		6,145	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia tepat satu tahun per 1.000 Kelahiran Hidup. Dengan 47 kasus kematian dari 6145 Kelahiran Hidup, maka Angka Kematian Bayi tahun 2016 adalah sebesar 7,65/1000 Kelahiran Hidup.

Kematian bayi pada masa neonatal (usia 0-28 hari) sebanyak 29 kasus, sedangkan kematian pada masa usia 29 hari – 11 bulan sebanyak 13 kasus. Asfiksia menjadi penyebab kematian terbesar pada masa neonatal yaitu sebesar 16 kasus (43,2%), kemudian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11 kasus (29,7%), Sepsis 6 kasus (16,2%), Pneumonia 2 kasus (5,4%). Kelainan Kongenital, Dehidrasi, Icterus, dan Kelainan Saluran Cerna masing-masing 1 kasus.

Sementara Diare Dehidrasi Berat menjadi penyebab kematian terbanyak pada kasus kematian usia 29 hari – 11 bulan dengan 4 kasus kematian, kemudian Pneumonia sebanyak 3 kasus, dan Gizi Buruk, Meningitis, Sepsis, Aspirasi ASI, Kelainan Kongenital, Kelainan Kulit masing-masing 1 kasus.

Dari 51 kasus kematian, 47 kasus terjadi di Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit), 3 kasus terjadi di rumah dan 1 kasus terjadi dalam perjalanan menuju Rumah Sakit.

Kasus kematian neonatal, bayi dan balita menurut jenis kelamin dan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi & Balita
 Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+PEREMPUAN			
		NEONATA L	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA	NEONATA L	BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BAROS	2	3	0	3	3	7	0	7	5	10	0	10
2	LEMBURSITU	4	7	2	9	2	6	1	7	6	13	3	16
3	CIBEUREUM	1	1	0	1	1	1	0	1	2	2	0	2
4	CITAMIANG	3	5	0	5	2	2	0	2	5	7	0	7
5	WARUDOYONG	2	2	0	2	1	3	0	3	3	5	0	5
6	GUNUNG PUYUH	3	4	0	4	3	3	1	4	6	7	1	8
7	CIKOLE	2	3	0	3	0	0	0	0	2	3	0	3
JUMLAH (KAB/KOTA)		17	25	2	27	12	22	2	24	29	47	4	51
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		5.5	8.1	0.6	8.7	3.9	7.2	0.7	7.9	4.72	7.65	0.7	8.30

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

4.2 Indikator Pendidikan

4.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah prosentasi penduduk umur 10 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengikuti kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka Melek huruf (AMH) berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menunjukkan pula kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap perkembangan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi pada prinsipnya sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari indikator penelitian masih terdapat sekitar 0,0001% penduduk yang belum

melek huruf, hal ini dikarenakan terdapat penduduk yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai pada wilayah tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid ditingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD

Tabel 4.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Paud Seluruhnya			Jumlah Penduduk 4-6 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Gn. Puyuh	799	855	1.654	1.277	1.145	2.422	62,6	74,7	68,3
2	Cikole	1.321	1.374	2.695	1.611	1.596	4.038	82,0	86,1	66,7
3	Citamiang	773	709	1.482	1.377	1.270	2.647	56,1	55,8	56,0
4	Warudoyong	980	943	1.923	1.510	1.353	2.863	64,9	69,7	67,2
5	Baros	570	602	1.172	967	835	1.802	58,9	72,1	65,0
6	Lembursitu	636	648	1.284	1.007	934	5.069	63,2	69,4	25,3
7	Cibeureum	656	643	1.299	1.162	1.074	2.236	56,5	59,9	58,1
	Jumlah	5.735	5.774	11.509	8.911	8.207	17.118	64,4	70,4	67,2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.3 tampak bahwa APK Kota Sukabumi tahun 2016 secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan PAUD adalah (67,2%). Capaian ini sudah termasuk dalam kategori baik mengingat pada jenjang ini tidak termasuk kedalam jenjang pendidikan wajib belajar. Dan jika ditambahkan dengan anak usia 6 tahun yang sudah berada di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.889 siswa, maka Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 3-6 Tahun mencapai 84,1%.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/ sederajat

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk 7-12 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Gn. Puyuh	2.549	2.361	4.910	2.611	2.320	4.931	97,6	101,8	99,6
2	Cikole	4.170	3.933	8.103	3.170	2.992	6.162	131,5	131,5	131,5
3	Citamiang	3.783	3.390	7.173	2.837	2.663	5.500	133,3	127,3	130,4
4	Warudoyong	2.885	2.757	5.642	3.088	2.887	5.975	93,4	95,5	94,4
5	Baros	1.786	1.694	3.480	1.791	1.767	3.558	99,7	95,9	97,8
6	Lembursitu	1.981	1.870	3.851	2.000	1.937	3.937	99,1	96,5	97,8
7	Cibeureum	2.314	2.159	4.473	2.337	2.091	4.428	99,0	103,3	101,0
	Jumlah	19.468	18.164	37.632	17.834	16.657	34.491	109,2	109,0	109,1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.4 tampak bahwa APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat berada di atas 100% (109,1%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan jenjang SD/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per Kecamatan capaian APK tertinggi di atas 100%, terdapat 3 Kecamatan yaitu Cikole (131,5%) dan Citamiang (130,4%) dan Cibeureum (101%), hal ini disebabkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan tersebut, termasuk siswa di luar Kota. Untuk capaian APK yang berada di bawah 100% yaitu berada di wilayah Gunungpuyuh (99,6%), Baros (97,8%), Lembursitu (97,8%) dan Warudoyong (94,4%). Hal ini disebabkan terdapat anak/ siswa yang bersekolah di luar wilayah kecamatan tersebut.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat

Tabel 4.5

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Seluruh			Jumlah Penduduk 13-15 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Gn. Puyuh	921	926	1.847	1.277	1.177	2.454	72,1	78,7	75,3
2	Cikole	3.045	3.425	6.470	1.520	1.412	2.932	200,3	242,6	220,7
3	Citamiang	1.963	2.010	3.973	1.406	1.239	2.645	139,6	162,2	150,2
4	Warudoyong	1.699	1.618	3.317	1.570	1.505	3.075	108,2	107,5	107,9
5	Baros	613	525	1.138	826	825	1.651	74,2	63,6	68,9
6	Lembursitu	1.126	1.099	2.225	861	850	1.711	130,8	129,3	130,0
7	Cibeureum	676	637	1.313	1.048	1.017	2.065	64,5	62,6	63,6
	Jumlah	10.043	10.240	20.283	8.508	8.025	16.533	118,0	127,6	122,7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.5 tampak bahwa APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat berada diatas 100% (122,7%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan jenjang SMP/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per Kecamatan APK tertinggi terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Cikole 220,7% dan Kecamatan Citamiang 150,2%. Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan, termasuk siswa di luar kota . Untuk capaian APK yang berada di bawah 100% yaitu berada di wilayah Baros (68,9%), Cibeureum (63,6%), dan Gunungpuyuh (75,3%). Hal ini disebabkan jumlah lembaga pendidikan jenjang SMP/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan terdapat anak/ siswa yang bersekolah di luar wilayah kecamatan tersebut.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat

Tabel 4.6

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk 16-18 Tahun			APK		
		L	P	L+P	L	P	Jumlah	Gender		L+P
								L	P	
1	Gn. Puyuh	1.017	998	2.015	1.004	954	1.958	101,3	104,6	102,9
2	Cikole	4.233	4.187	8.420	1.321	1.338	3.209	320,4	312,9	262,4
3	Citamiang	2.587	3.766	6.353	1.121	1.087	2.208	230,8	346,5	287,7
4	Warudoyong	1.231	1.099	2.330	1.349	1.211	2.560	91,3	90,8	91,0
5	Baros	73	37	110	765	732	1.497	9,5	5,1	7,3
6	Lembursitu	1.697	762	2.459	797	720	4.166	212,9	105,8	59,0
7	Cibeureum	505	442	947	903	809	1.712	55,9	54,6	55,3
	Jumlah	11.343	11.291	22.634	7.260	6.851	14.111	156,2	164,8	160,4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Tabel 4.6 tampak bahwa APK Kota Sukabumi secara keseluruhan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat berada di atas 100% (160,4%). Hal ini menunjukkan tingkat perhatian penduduk terhadap pendidikan jenjang SMA/ sederajat pada umumnya tinggi. Apabila dilihat per Kecamatan APK tertinggi terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Cikole (262,4%) dan Citamiang (287,7%). Hal ini menunjukkan bahwa di kecamatan tersebut memiliki lembaga pendidikan paling banyak dan diminati oleh siswa di luar kecamatan, termasuk siswa di luar kota. APK terendah berada di Kecamatan Baros (7,3%) dan Kecamatan Cibeureum (55,3%). Hal ini karena di kecamatan tersebut keberadaan lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat tidak seimbang dengan jumlah penduduk, bahkan untuk

Kecamatan Baros lembaga pendidikan jenjang SMA/ sederajat sangat minim, selain itu dikerenakan penyebaran siswa jenjang SMA/ sederajat tersebut banyak yang masuk ke wilayah perkotaan.

4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Rumus :

$$APM = \frac{\text{Jml murid kelp usia sekolah di jenjang pendidikan tententu}^*}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}^*} \times 100\%$$

a. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/ sederajat

Tabel 4.7

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/ sederajat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa 7-12 Tahun			Jumlah Penduduk 7-12 Tahun			APM		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Gn. Puyuh	2.581	2.313	4.894	2.611	2.320	4.931	98,9	99,7	99,2
2	Cikole	3.052	2.881	5.933	3.170	2.992	6.162	96,3	96,3	96,3
3	Citamiang	2.773	2.617	5.390	2.837	2.663	5.500	97,7	98,3	98,0
4	Warudoyong	3.041	2.828	5.869	3.088	2.887	5.975	98,5	98,0	98,2
5	Baros	1.602	1.537	3.139	1.791	1.767	3.558	89,4	87,0	88,2
6	Lembursitu	1.948	1.892	3.840	2.000	1.937	3.937	97,4	97,7	97,5
7	Cibeureum	2.278	2.027	4.305	2.337	2.091	4.428	97,5	96,9	97,2
	Jumlah	17.275	16.095	33.370	17.834	16.657	34.491	96,9	96,6	96,7

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Tabel 4.7 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Sukabumi jenjang SD/ Sederajat berada di atas 90% (96,7%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sangat baik karena capaian APM hampir mendekati 100%.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Gunung Puyuh menempati posisi APM yang paling tinggi yaitu di atas 99,2 %, karena jumlah murid SD (7-12) tahun hampir berimbang dengan jumlah penduduk usia jenjang Sekolah Dasar (7-12) tahun, siswa SD di luar usia 7-12 tahun dan siswa domisili luar kota tidak terlalu signifikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/ sederajat

Tabel 4.8
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/ sederajat

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Seluruh 13-15 Tahun			Jumlah Penduduk 13-15 Tahun			APM		
		L	P	L+P	L	P	L+P	Gender		L+P
								L	P	
1	Gunung Puyuh	1.242	1.137	2.379	1.277	1.177	2.454	97,3	96,6	96,9
2	Cikole	1.404	1.387	2.791	1.520	1.412	2.932	92,4	98,2	95,2
3	Citamiang	1.398	1.193	2.591	1.406	1.239	2.645	99,4	96,3	98,0
4	Warudoyong	1.553	1.383	2.936	1.570	1.505	3.075	98,9	91,9	95,5
5	Baros	810	799	1.609	826	825	1.651	98,1	96,8	97,5
6	Lembursitu	836	837	1.673	861	850	1.711	97,1	98,5	97,8
7	Cibeureum	1.000	976	1.976	1.048	1.017	2.065	95,4	96,0	95,7
	Jumlah	8.243	7.712	15.955	8.508	8.025	16.533	96,9	96,1	96,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Tabel 4.8 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Sukabumi jenjang SMP/ Sederajat capaiannya adalah 96,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi, dimana antara usia dan jenjang pendidikan sudah tercapai kesesuaiannya.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Citamiang menempati posisi APM paling tinggi yaitu 98%.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/ sederajat

Tabel 4.9

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/ sederajat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa 16-18 Tahun			Jumlah Penduduk 16-18 Tahun			APM		
		L	P	L+P	L	P	Jumlah	Gender		L+P
								L	P	
1	Gn. Puyuh	964	942	1.906	1.004	954	1.958	96,0	98,7	97,3
2	Cikole	1.275	1.308	2.583	1.321	1.338	3.209	96,5	97,8	97,1
3	Citamiang	1.101	1.080	2.181	1.121	1.087	2.208	98,2	99,4	98,8
4	Warudoyong	1.304	1.188	2.492	1.349	1.211	2.560	96,7	98,1	97,3
5	Baros	763	727	1.490	765	732	1.497	99,7	99,3	99,5
6	Lembursitu	787	705	1.492	797	720	4.166	98,7	97,9	98,4
7	Cibeureum	869	794	1.663	903	809	1.712	96,2	98,1	97,1
	Jumlah	7.063	6.744	13.807	7.260	6.851	14.111	97,3	98,4	97,8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Tabel 4.9 di atas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Sukabumi jenjang SMA/Sederajat sangat tinggi yaitu 97,8%. Angka ini sudah relatif sangat baik dimana sudah terdapat kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan dan jenjang SMA sederajat merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang SMP dan SD.

Bila dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Baros menempati posisi APM paling tinggi yaitu 99,5%.

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Didefinisikan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini

dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

Angka RLS akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Angka RLS akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran per Kapita.

Tabel 4.10

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

No.	Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah	Lama Masa Pendidikan yg Dihadiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yg Dihadiskan
1	TAMAT SD	75.098	6	450.588
2	TAMAT SMP	49.544	9	445.896
3	TAMAT SMA	85.477	12	1.025.724
4	TAMAT D1	1.693	13	22.015
5	TAMAT D2	1.386	14	19.398
6	TAMAT D3	6.714	15	100.710
8	TAMAT S1	14.855	16	237.680
9	TAMAT S2	1.275	18	22.950
10	TAMAT S3	58	21	1.218
	Jumlah	239.527		2.326.179
	RLS			9,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Tabel 4.10 di atas bahwa di Kota Sukabumi Angka RLS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana Angka RLS pada Tahun 2014 sebesar 9,6 Tahun dan pada Tahun 2015 sebesar 9,7 Tahun, kemudian pada Tahun 2016 sebesar 9,71 Tahun.

4.3 Indikator Keluarga Berencana

4.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami-isteri yang isterinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau isteri sudah berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

Jumlah PUS di Kota Sukabumi pada tahun 2016 mencapai 54.843 pasangan, dimana jumlah PUS terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong yaitu 10.023 pasangan dan jumlah PUS paling sedikit berada di Kecamatan Baros yaitu 6.140 pasangan.

Gambaran rinci jumlah PUS di Kota Sukabumi terlihat pada Tabel 4.11 dan Grafik 4.1 berikut ini:

Tabel 4.11

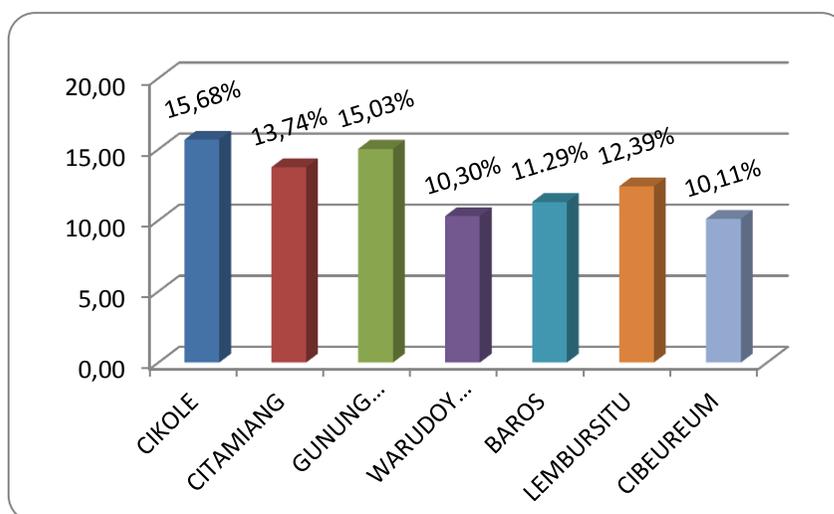
Data Pasangan Usia Subur (PUS)

NO.	KECAMATAN	PUS	%
1.	GUNUNG PUYUH	7.451	15.03
2.	CIKOLE	9.025	15.68
3.	CITAMIANG	8.377	13.74
4.	WARUDUYONG	10.023	10.30
5.	BAROS	6.140	11.29
6.	LEMBURSITU	7.350	12.39
7.	CIBEUREUM	6.477	10.11
KOTA SUKABUMI		54.371	12.72

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2016

Grafik 4.1

Persentase PUS Per Kecamatan



4.3.2 Peserta KB Aktif

Peserta Keluarga Berencana (akseptor KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dimana salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

Yang dimaksud dengan Peserta KB Aktif (PA) atau lebih dikenal dengan *Current User (CU)* adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara-cara kontrasepsi tradisional, seperti pijat urut, jamu dan juga tidak termasuk cara-cara KB alamiah seperti pantang berkala, senggama terputus dan sebagainya. Kontrasepsi adalah cara atau alat yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan).

Tabel 4.12

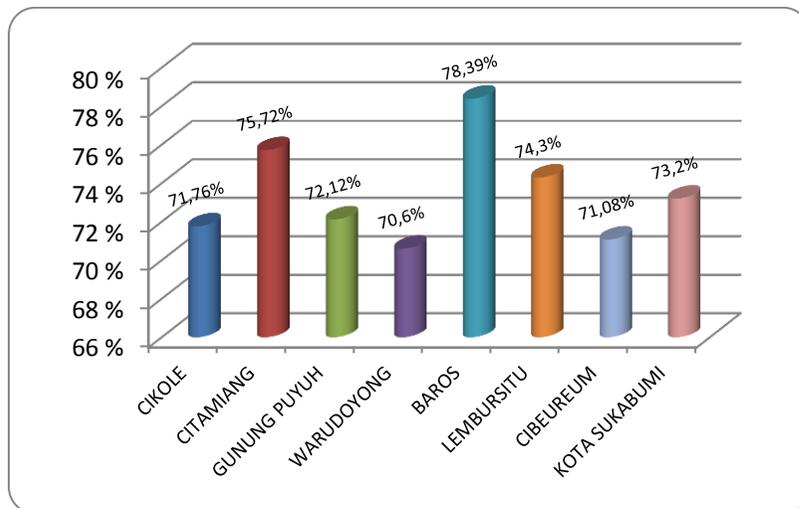
Data Peserta KB Aktif (CU/PUS)

NO	KECAMATAN	ALAT KONTRASEPSI							PUS	JUMLAH CU	CU/PUS (%)
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL			
1	GN. PUYUH	693	186	17	148	502	2.395	1.433	7.451	5.374	72.12
2	CIKOLE	1.029	192	38	206	431	2.846	1.734	9.025	6.476	71.76
3	CITAMIANG	625	180	30	147	318	3.361	1.682	8.377	6.343	75.72
4	WARUDOYONG	947	203	28	244	968	3.093	1.593	10.023	7.076	70.60
5	BAROS	568	80	12	62	344	2.304	1.443	6.140	4.813	78.39
6	LEMBURSITU	483	148	21	344	779	2.305	1.381	7.350	5.461	74.30
7	CIBEUREUM	511	112	9	115	214	2.499	1.144	6.477	4.606	71,08
KOTA SUKABUMI		54.371	4.856	1.101	1.55	1.266	3.556	18.803	10.410	54.843	40.147

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2016

Grafik 4.2

Peserta KB Aktif (CU/PUS)



Pada Tabel 4.12 dan Grafik 4.2 di atas memperlihatkan prevalensi Peserta KB Aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi Tahun 2016 mencapai $40.147 / 54.843 \times 100\% = 73,20\%$.

Kondisi prevalensi peserta KB aktif pada Tahun 2016 mencapai 73,20% lebih tinggi dari target RPJMD 2013-2018 Kota Sukabumi yaitu sebesar 67,45% menandakan bahwa cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kota Sukabumi telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 yang mencapai 73,57%, capaian tahun 2016 menunjukkan peningkatan prevalensi peserta KB aktif di Kota Sukabumi yang berarti bahwa pencapaian sasaran strategis terkendalanya laju pertumbuhan penduduk alamiah mulai membaik.

4.3.3 Peserta KB Aktif Menurut Jalur Pelayanan

Saat ini jalur pelayanan KB yang dilakukan di Kota Sukabumi terbagi dua, yaitu jalur pelayanan KB pemerintah dan jalur pelayanan KB swasta. Oleh karenanya Peserta KB Aktif pun dapat dibedakan menurut jalur pelayanannya, yaitu peserta KB pemerintah dan peserta KB swasta.

Peserta KB pemerintah adalah peserta KB yang memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan pemerintah, seperti Puskesmas, Klinik KB/ Rumah Sakit Pemerintah. Sedangkan peserta KB swasta adalah peserta KB yang memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan swasta, seperti misalnya: dokter/bidan praktek swasta, apotek, toko obat dan lain-lainnya.

Gambaran secara rinci kondisi Peserta KB Aktif menurut jalur pelayanan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.19 dan Tabel 4.13 dan Grafik 4.3 di bawah ini :

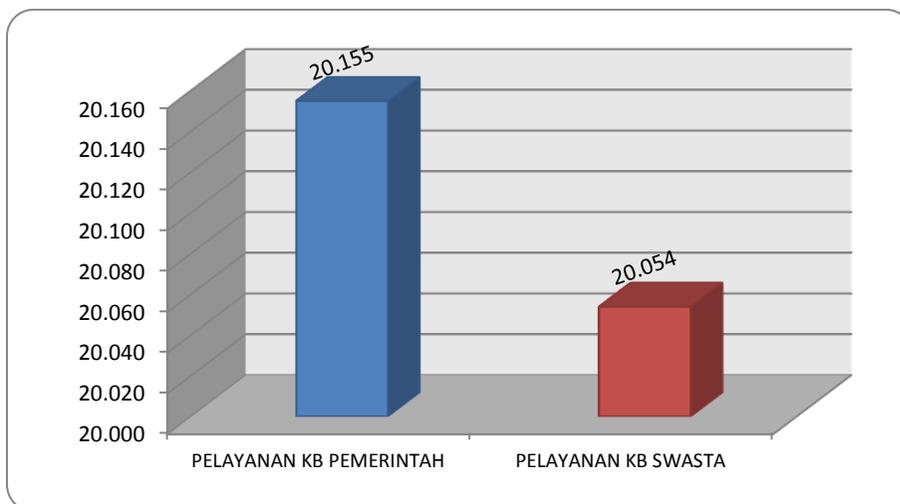
Tabel 4.13

Data Peserta KB Aktif Pelayanan KB Pemerintah

NO.	KECAMATAN	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH KESELURUHAN
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1.	GUNUNG PUYUH	410	163	17	103	303	981	706	2.683
2.	CIKOLE	534	127	23	120	367	842	795	2.808
3.	CITAMIANG	380	162	28	71	306	1.706	740	3.393
4.	WARUDOYONG	511	180	28	141	760	1.233	832	3.685
5.	BAROS	314	63	12	42	301	906	679	2.317
6.	LEMBURSITU	282	134	20	200	591	1.096	670	2.995
7.	CIBEUREUM	220	72	7	43	203	936	793	2.274
KOTA SUKABUMI		2.272	2.651	901	135	720	2.831	7.702	5.215

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2016

Grafik 4.3
Peserta KB Aktif (CU/PUS) Menurut Jalur Pelayanan



Pada Tabel 4.13 dan Grafik 4.3 di atas memperlihatkan bahwa jalur pelayanan KB di Kota Sukabumi di Tahun 2016 secara umum di dominasi oleh jalur pelayanan KB pemerintah. Kondisi ini mengandung arti bahwa kemandirian masyarakat Kota Sukabumi untuk mengikuti program KB sedikit menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi jumlah Peserta KB Aktif pelayanan pemerintah maka dapat dikatakan semakin rendah pula kemandirian ber-KB masyarakatnya atau dengan kata lain tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan KB pemerintah sangat tinggi.

4.3.4 Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB

PUS bukan peserta KB terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu hamil (H), ingin anak segera (IAS), ingin anak ditunda (IAT), dan tidak ingin anak lagi (TIAL). Pengertian PUS bukan peserta KB “hamil” adalah PUS yang istrinya sedang hamil; “ingin anak segera” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan masih menginginkan anak dengan batas waktu kurang dari dua tahun; “ingin anak tunda” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan menginginkan kelahiran anak ditunda dengan batas waktu dua tahun lebih; “tidak ingin anak lagi” adalah PUS yang sedang tidak menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan tidak ingin anak.

Salah satu dimensi dari PUS bukan peserta KB dikenal istilah *Unmet Need* yang khusus diperuntukkan untuk kategori “ingin anak tunda” dan “tidak ingin anak lagi”. Sesuai dengan pengertiannya, *Unmet Need* adalah proporsi wanita usia subur dalam status menikah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak dan atau mereka yang *Unmet Need* karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk, tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).

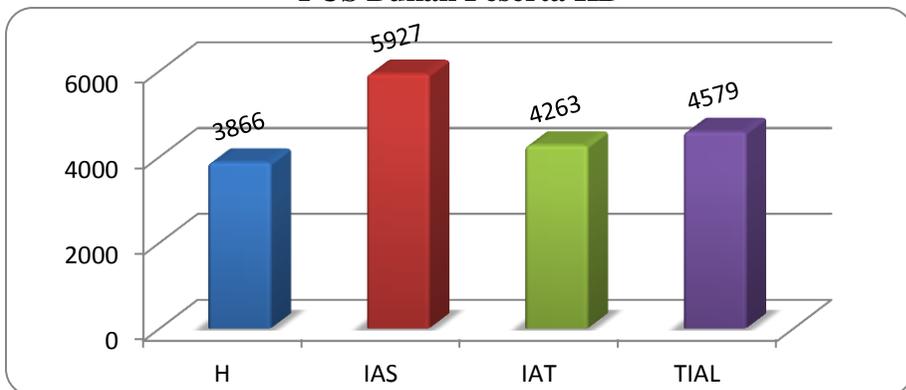
Tabel 4.14

Data PUS Bukan Peserta KB

NO	KECAMATAN	H	IAS	IAT	TIAL	JUMLAH
1.	GUNUNG PUYUH	404	874	810	639	2.727
2.	CIKOLE	411	924	809	833	2.977
3.	CITAMIANG	402	678	526	906	2.512
4.	WARUDROYONG	1.311	1.347	746	682	4.086
5.	BAROS	445	471	368	578	1.862
6.	LEMBURSITU	485	674	654	422	2.235
7.	CIBEUREUM	408	959	350	519	2.236
KOTA SUKABUMI		2.888	5.927	4.263	4.579	18.635

Sumber : Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2016

Grafik 4.4
PUS Bukan Peserta KB



Pada Tabel 4.14 dan Grafik 4.4 di atas, memperlihatkan potret kondisi PUS bukan peserta KB di Kota Sukabumi. Jumlah PUS bukan peserta KB pada tahun 2016 mencapai angka 18.635 atau 33,98% dari total PUS yang ada di Kota Sukabumi dimana jumlah kategori PUS bukan peserta KB “ingin anak segera” mendominasi wilayah ini dengan angka mencapai 5.927 atau 10,81% dari total jumlah PUS bukan peserta KB.

Di lain sisi, *Unmet Need* Kota Sukabumi pada Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 13,91% di tahun 2015 menjadi 12,72% di Tahun 2016. Walaupun capaian *unmet need* di Tahun 2016 mengalami penurunan, namun tetap tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena selama ini fokus penggarapan sasaran program KB lebih ditekankan kepada akseptor KB aktif dalam konteks alih cara dari metode kontrasepsi jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang, Manajemen data sasaran yang belum memadai dari para PKB/PLKB dan TPD, serta minimnya wawasan dan pola pikir masyarakat tentang program KB khususnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus diupayakan tingkat penurunannya untuk semakin mendorong atau meningkatkan pencapaian target realisasi peserta KB aktif (CU/PUS) di Kota Sukabumi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang intensif tentang program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) kepada masyarakat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan ini.

4.3.5 Tahapan Keluarga

Tahapan keluarga sedianya digunakan sebagai cerminan kualitas keluarga. Semakin tinggi tahapannya maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Ada 5 tahapan keluarga menurut BKKBN yaitu :

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2) Keluarga Sejahtera Tahap I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3) Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4) Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya (*basic needs*), kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), maupun yang bersifat kebutuhan pengembangannya, serta telah dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel 4.15
Data Tahapan Keluarga¹

NO	KECAMATAN	PENTAHAPAN					JML
		PRA KS	KS. I	KS. II	KS. III	KS. III PLUS	
1	GUNUNGPUYUH	628	2.641	3.994	3.391	1.707	12.361
2	CIKOLE	428	2.157	5.324	7.499	1.143	16.551
3	CITAMIANG	451	2.702	4.113	3.905	1.371	12.542
4	WARUDOYONG	273	2.987	6.397	3.851	1.402	14.910
5	BAROS	201	2.136	3.365	2.057	937	8.696
6	LEMBURSITU	681	1.400	4.550	3.413	624	10.668
7	CIBEUREUM	345	2.624	3.8822	2.560	1.304	10.655
KOTA SUKABUMI		3.054	16.647	31.565	26.676	8.488	86.383

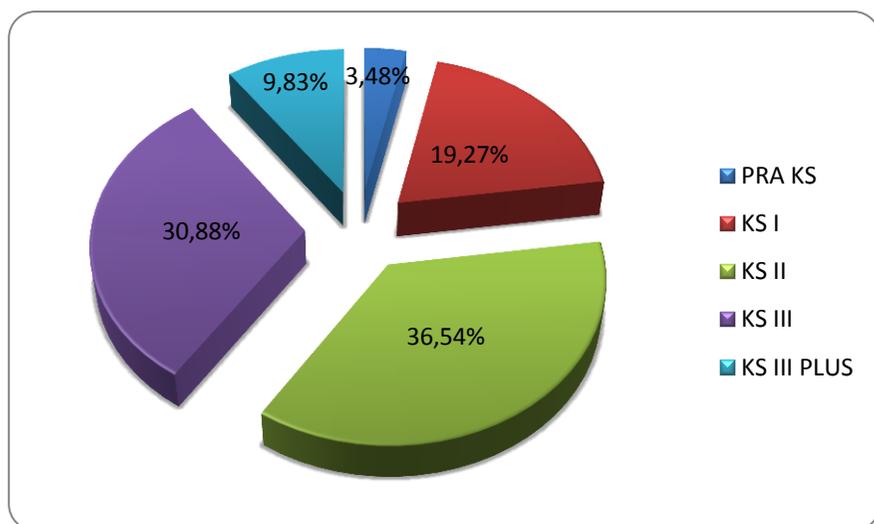
Sumber: Bidang KS BPMPKB Kota Sukabumi Tahun 2016

Pada Tabel 4.15 di atas, memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Keluarga Pra Sejahtera, sebagai cerminan tahapan keluarga terendah, di Kota Sukabumi mencapai angka 3.007 atau dengan kata lain mencapai $3.007/86.383 \times 100\% = 3,84\%$ dari total jumlah keluarga di Kota Sukabumi.

¹ Hasil penghitungan sementara

Kemudian apabila melihat kondisi per wilayah, maka Jumlah keluarga Pra Sejahtera terbanyak berada di Kecamatan Lembursitu sebanyak $681/3.007 \times 100\% = 22,65\%$ dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi. Sedangkan jumlah keluarga Pra Sejahtera terendah berada di Kecamatan Baros sebanyak $201/3.007 \times 100\% = 6,68\%$ dari total jumlah keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kota Sukabumi.

Grafik 4.5
Tahapan Keluarga Kota Sukabumi



Selanjutnya lebih jelas dalam Grafik 4.5 di atas, tergambar secara umum kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Sukabumi. Persentase terendah dari tahapan keluarga sejahtera adalah keluarga Pra Sejahtera yang diwakili oleh bagian warna biru tua sebanyak 3,48% dari total Jumlah keluarga di Kota Sukabumi dan persentase tertinggi yaitu pada tahapan keluarga Sejahtera II sebanyak 36,54% dari total jumlah keluarga yang digambarkan dengan bagian warna hijau.

Sesuai dengan pengertian dari tahapan keluarga sejahtera II, maka kondisi ini mengandung makna bahwa sebagian besar keluarga di Kota Sukabumi merupakan keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) juga telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4.4 Indikator Tenaga Kerja

4.4.1 Jumlah Pencari Kerja

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja dan yang lazim dipakai adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas atau 15-64 tahun. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja. Dengan perkataan lain, tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Angkatan Kerja (*Labor Force*)
2. Bukan Angkatan Kerja (*Not In The Labor Force*)

Angkatan kerja adalah kelompok pekerja dalam suatu pekerjaan. Hal ini umumnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja untuk satu perusahaan atau industri, tetapi juga dapat diterapkan pada wilayah geografis seperti kota, negara bagian, negara, dan lain-lain. Tenaga kerja dari suatu negara baik yang bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi, EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja.

1. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.

2. Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran.

Data angkatan kerja Kota Sukabumi Tahun 2016 :

Tabel 4.16
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur per Kecamatan
Tahun 2016

N O	KELOMPOK UMUR	GUNUNG PUYUH	CIKOLE	CITA MIANG	WARU DOYONG	BAROS	LEMBUR SITU	CIBEU REUM	TOTAL
1	20-24	4.082	5.070	4.479	4.865	3.227	3.244	3.532	28.499
2	25-29	3.883	4.956	4.221	4.526	2.944	3.147	3.196	26.873
3	30-34	4.017	5.207	4.361	4.872	3.137	3.417	3.608	28.619
4	35-39	3.739	4.972	4.080	4.628	2.762	2.983	3.376	26.540
5	40-44	3.328	4.439	3.780	4.077	2.438	2.749	3.048	23.859
6	45-49	3.074	4.018	3.403	3.664	2.383	2.601	2.669	21.812
7	50-54	2.681	3.583	2.962	3.141	2.141	2.161	2.240	18.909
8	55-59	2.162	3.042	2.606	2.619	1.534	1.694	1.626	15.283
9	60-64	1.685	2.681	1.948	1.990	1.089	1.401	1.122	11.916
10	65-69	992	1.651	1.204	1.307	637	883	757	7.431
JUMLAH		29.643	39.619	33.044	35.689	22.292	24.280	25.174	209.741

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2016

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan. Data Bukan Angkatan Kerja Kota Tahun 2016.

Tabel 4.17
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja per Kecamatan
Tahun 2016

NO	PEKERJAAN	GUNUNG PUYUH	CIKOLE	CITA MIANG	WARU DOYONG	BAROS	LEMBUR SITU	CIBEU REUM	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	11.575	14.068	13.800	12.496	7.691	8.435	10.087	78.152
2	Mengurus Rumah Tangga	10.318	14.171	12.084	13.883	8.478	9.946	9.618	78.498
3	Pelajar/Mhs	9.355	11.898	8.512	11.372	6.752	6.967	7.233	62.089
4	Lainnya	6	5	1	6	2	7	12	39
	JUMLAH	31.254	40.142	34.397	37.757	22.923	25.355	26.950	218.778

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2016

3. Pengertian Kesempatan Kerja

Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja.

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan.

Tabel 4.18
Angkatan Kerja per Kecamatan
Tahun 2016

NO	RINCIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	KET.
1	BURSA KERJA KHUSUS (BKK)/ SMK	1500		DALAM / LUAR NEGERI
2	TKI : FORMAL/INFORMAL.	450	Minimal SMP	Asia Pasifik
4	MAGANG PERHOTELAN /KAPAL PESIAR LUAR NEGERI	250	Minimal Pariwisata	
3	PERHOTELAN DALAM NEGERI	200	Minimal Pariwisata	NASIONAL
4	FINANCE MOTOR/MOBIL	SEBANYAK – BANYAKNYA	MINIMAL SMA	NASIONAL
5	RETAIL	3000	MINIMAL SMA	NASIONAL
6	PABRIK	4500	MINIMAL SMA	NASIONAL
7	PER-BANKAN	SEBANYAK – BANYAKNYA	MINIMAL SMA	NASIONAL
8	LAINNYA		MINIMAL SMA	NASIONAL

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2016

Kendala-kendala ketenagakerjaan di Kota Sukabumi :

1. Masalah pokok ketenagakerjaan di Kota Sukabumi, saat ini adalah ketidakseimbangan antara penyediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.
2. Dampak utama yang akan terjadi adalah membengkaknya jumlah pengangguran dan masalah sosial yang menyertainya.
3. Kesempatan kerja yang terbatas.
4. Rendahnya kualitas angkatan kerja.

-
5. Rendahnya kualitas angkatan kerja ini diindikasikan dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SMA/SMK sederajat ke bawah.
 6. Pasar kerja lebih banyak membutuhkan pencari Kerja yang telah Berkompetensi.

Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Penekanan terhadap pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Kewirausahaan melalui Pemberian Pelatihan Produktivitas dan Pemberdayaan Tenaga kerja melalui Dinas tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2016 :
 - a) Kewirausahaan sebanyak 25 orang;
 - b) Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) :
 - 1) Bidang Kejuruan Tata Boga 20 Orang;
 - 2) Bidang Kejuruan menjahit 25 Orang;
 - c) Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja / Angkatan kerja.
 - 1) Pelatihan Menjahit sebanyak 40 Orang;
 - 2) Pelatihan Tata Rias Kecantikan sebanyak 40 Orang.
 - 3) Pelatihan Las Listrik sebanyak 40 orang;
 - 4) Pelatihan servis HP. sebanyak 40 Orang

Tabel 4.19
Ikhtisar AK.I Tahun 2016
Penempatan, Penghapusan, dan yang Belum Ditempatkan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENCARI KERJA	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		L	P	JML	L	P	JML
	TINGKAT PENDIDIKAN	4	5	6	7	8	9
1	Tidak Tamat SD						
2	SD/Sederajat	52	185	237	42	142	184
3	SMP/Sederajat	350	965	1.315	263	914	1.177
4	SMA/Sederajat	2.255	1.871	4.126	2228	1732	3.960
5	D.I/D.II/ AKTA. I dan II, D.III	154	199	353	119	158	277
6	Sarjana	258	249	507	218	241	459
Jumlah		2.981	3.069	3.469	6.538	2.870	3.187
I	Penempatan	2.824	2.473	5.297	2.287	2.901	5.188
II	Penghapusan						
III	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan	245	996	1.241	477	304	781
REALISASI PENEMPATAN		81.02%			85.65%		
REALISASI TARGET PENEMPATAN = 5000/TAHUN		105.94%			103,76%		
PROSENTASE YANG BELUM DITEMPATKAN		23.43%			15.05%		

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2016

Apabila dilihat pada Tabel 4.19, pencari kerja yang sudah ditempatkan dalam arti sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.188 atau 85,65% dari jumlah pencari kerja sebanyak 5.969, sedangkan pencari kerja yang belum ditempatkan dalam arti belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 781 atau 15,05%.

Tabel 4.20

Rincian Penempatan Berdasarkan AK.I Tahun 2016

NO	RINCIAN	JUMLAH	%	KET.
1	BURSA KERJA KHUSUS (BKK)/ SMK	1.015		BKK
2	TKI	53		
3	MAGANG PERHOTELAN DALAM NEGERI	10		LPK
4	MAGANG PERHOTELAN /KAPAL PESIAR LUAR NEGERI	97		
5	PENEMPATAN PERHOTELAN /KAPAL PESIAR LUAR NEGERI	167		
6	FINANCE MOTOR/MOBIL	165		
7	RETAIL	324		
8	GSI	852		
9	NIKE	432		
10	PER-BANKAN	221		
11	SEMEN JAWA/SCG	86		
12	LAINNYA	1.766		
JUMLAH YANG DITEMPATKAN		5.188	85,65	
JUMLAH YANG TERDAFTAR		6.057		
JUMLAH YANG BELUM DITEMPATKAN BERDASARKAN AK. I 2016		781	12,89	
TARGET PENEMPATAN KOTA SUKABUMI PER-TAHUN		5.000	103,76	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Tahun 2016

4.5. Indikator Sosial

4.5.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembangunan di bidang kependudukan sangat terkait dengan permasalahan di bidang sosial. Apalagi Kota Sukabumi sebagai kota perdagangan dan jasa akan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya urbanisasi yang ujung-ujungnya membawa pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya permasalahan-permasalahan sosial.

Tabel 4.21

Rekapitulasi Pendataan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2016

No	PMKS	KECAMATAN							Jumlah
		Gunung Puyuh	Cikole	Citamiang	Warudoyong	Baros	Lembursitu	Cibeureum	
1	Anak Terlantar	23	19	53	82	39	72	57	345
2	Anak berhadapan dgn hukum	1	2	12	22	2	8	2	49
3	Balita Terlantar	3	1	36	30	1	2	11	84
4	Anak Jalanan	1	1	1	30	4	8	4	49
5	Lanjut Usia Terlantar	94	229	109	294	79	206	153	1.164
6	Pengemis	15	3	7	4	11	7	1	48
7	Gelandangan	1	-	4	1	-	4	3	13
8	Korban Narkoba	11	1	3	-	2	13	5	35
9	Tuna Susila	-	-	3	1	-	-	5	9
10	Eks Narapidana	18	1	6	16	4	10	15	70
11	Penyandang Cacat	69	82	97	93	104	97	165	707
12	C. Anak dengan Kedistabilitan	10	14	29	53	22	20	41	189
13	Keluarga Fakir Miskin	9.373	9.220	12.069	12.921	11.735	17.567	9.922	82.807
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	10	-	30	10	1	6	10	67
15	Anak Korban Tindak Kekerasan	2	26	4	25	20	7	-	84

No	PMKS	KECAMATAN							Jumlah
		Gunung Puyuh	Cikole	Citamiang	Warudoyong	Baros	Lembursitu	Cibeureum	
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	392	250	186	210	255	420	448	4.770
17	Korban Bencana Alam	1	3	2	7	5	-	1	19
18	Korban Bencana Sosial	-	-	30	5	-	2	18	55
19	Kelompok Minoritas	-	-	69	8	-	-	2	79
20	Pemulung	23	13	22	32	53	27	88	258
21	Korban Kekerasan	-	1	-	1	-	11	-	13
22	ODHA	-	-	-	-	-	-	-	1.041
23	Trafficking	4	2	1	2	11	26	-	46
24	Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	3	1	8	29	3	19	15	78
25	Pekerja migrant bermasalah sosial	1	-	19	-	-	1	2	23
	JUMLAH	10.055	9.869	12.800	13.876	12.351	18.533	10.968	92.102

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2016

Tabel 4.22

Penanganan PMKS di Kota Sukabumi Tahun 2016

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	YANG SUDAH DITANGANI	YANG BELUM DITANGANI	KETERANGAN
1	Anak Jalanan	49	130	-81	Banyak dari anak jalanan yang berasal dari luar Wilayah Kota Sukabumi
2	Gelandangan dan Pengemis (disatukan penanganannya)	61	155	-94	Banyak dari Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar Wilayah Kota Sukabumi
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	49	14	35	
4	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.770	30	4.740	
5	Korban tindak kekerasan	13	43	-30	
6	Lanjut Usia terlantar	1.164	60	1.104	
7	Tuna susila	9	30	-21	Banyak dari tuna susila yang berasal dari luar Wilayah Kota Sukabumi
8	Bekas warga binaan LP	70	0	70	
9	Korban Penyalahgunaan NAPZA	35	0	35	
10	Fakir Miskin	82.807	38.387	44.420	
11	Keluarga Tidak Layak Huni			0	Keluarga tidak layak huni tidak masuk kedalam 26 kategori PMKS
12	Korban Bencana Alam	250 KK 634 Jiwa	250 KK 634 Jiwa	0	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2016

4.6 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk yang permanen atau dikenal dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*Push Factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*Pull Factor*) wilayah lainnya.

Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain.

Mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya dorong disebut migrasi keluar, sedangkan mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya tarik disebut migrasi masuk.

4.6.1 Angka Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*In Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{AMM} &= \frac{\text{Banyaknya migran masuk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{9.323}{330.974} \times 1000 = 28.16 \end{aligned}$$

Angka migrasi masuk Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah 28.16. Hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 28 - 29 jiwa.

Apabila dilihat migrasi penduduk masuk ke Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2016 paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 1.706 jiwa atau 18,29% dari total migrasi masuk, sedangkan migrasi masuk yang paling sedikit berada di Kecamatan Lembursitu sejumlah 1.039 jiwa atau 11,14% dari total migrasi masuk. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.23 di bawah ini.

Tabel 4.23
Migrasi Penduduk Masuk Kota Sukabumi Tahun 2016

NO	KECAMATAN TUJUAN	DATANG DALAM PROV	DATANG LUAR PROV	JUMLAH MIGRAN MASUK
1	GUNUNG PUYUH	1.138	419	1.557
2	CIKOLE	1.370	336	1.706
3	CITAMIANG	1.042	250	1.292
4	WARUDOYONG	1.161	321	1.482
6	BAROS	841	187	1.028
6	LEMBURSITU	906	133	1.039
7	CIBEUREUM	1.014	205	1.219
		7.472	1.851	9.323

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Tabel 4.24
Migrasi Penduduk Masuk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016

KELOMPOK_UMUR	JLM_MIGRAN_MASUK
00-04	531
05-09	872
10-14	617
15-19	668
20-24	1.522
25-29	1.629
30-34	1.173
35-39	809
40-44	506
45-49	384
50-54	264
55-59	149
60-64	105
65-69	51
70-74	26
>=75	17
	9.323

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Tabel 4.25
Migrasi Penduduk Masuk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2016

KODE	JENIS_PKRJN	JML MIGRAN MASUK
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.326
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2.440
3	PELAJAR/MAHASISWA	1.807
4	PENSIUNAN	51
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	130
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	11
7	KEPOLISIAN RI	39
8	PERDAGANGAN	23
9	PETANI/PEKEBUN	34
12	INDUSTRI	3
13	KONSTRUKSI	0
14	TRANSPORTASI	6
15	KARYAWAN SWASTA	1.371
16	KARYAWAN BUMN	39
17	KARYAWAN BUMD	11
18	KARYAWAN HONORER	65
19	BURUH HARIAN LEPAS	546
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	6
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	6
24	TUKANG CUKUR	0
27	TUKANG KAYU	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0
30	TUKANG JAHIT	0
34	PENATA RAMBUT	6

KODE	JENIS_PKRJN	JML MIGRAN MASUK
35	MEKANIK	0
36	SENIMAN	0
41	IMAM MESJID	3
42	PENDETA	3
44	WARTAWAN	3
45	USTADZ/MUBALIGH	0
46	JURU MASAK	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN /	0
64	DOSEN	23
65	GURU	110
69	ARSITEK	3
70	AKUNTAN	0
72	DOKTER	9
73	BIDAN	11
74	PERAWAT	34
75	APOTEKER	42
79	PELAUT	6
81	SOPIR	45
84	PEDAGANG	73
87	BIARAWATI	14
88	WIRASWASTA	1.015
89	LAINNYA	3
	JUMLAH	9.323

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

4.6.2 Angka Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar (*Out Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{AMK} &= \frac{\text{Banyaknya migran keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{7.662}{330.974} \times 1000 = 23,15 \end{aligned}$$

Angka migrasi keluar Kota Sukabumi adalah 23,15 hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 23 – 24 jiwa.

Apabila dilihat migrasi keluar penduduk Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2016 paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 1.546 jiwa atau 20,17% dari total migrasi keluar, sedangkan migrasi keluar yang paling sedikit dari Kecamatan Warudoyong sebanyak 701 jiwa atau 9,15% dari migrasi keluar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.26 di bawah ini.

Tabel 4.26
Migrasi Penduduk Keluar Kota Sukabumi
Tahun 2016

NO	KECAMATAN TUJUAN	PINDAH KELUAR KAB	PINDAH KELUAR PROP	JML MIGRAN KELUAR
1	GUNUNG PUYUH	972	246	1.218
2	CIKOLE	1.182	341	1.523
3	CITAMIANG	865	201	1.066
4	WARUDOYONG	1.159	387	1.546
5	BAROS	576	125	701
6	LEMBURSIU	605	152	757
7	CIBEUREUM	650	201	851
		1.653	7.662	7.662

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

Tabel 4.27
Migrasi Penduduk Keluar Menurut Alasan Kepindahan
Tahun 2016

NO	ALASAN	JUMLAH
1	PEKERJAAN	123
2	PENDIDIKAN	26
3	KEAMANAN	65
4	KESEHATAN	100
5	PERUMAHAN	6.710
6	KELUARGA	577
7	LAIN-LAIN	61
		7.662

Sumber : DKB Semester II Tahun 2016

4.6.3 Angka Migrasi Netto

Angka Migrasi Netto (*Net Migration*) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif.

Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut

Rumus :

$$MN = \frac{\text{Banyaknya migran masuk} - \text{banyaknya migran keluar}}{\text{banyaknya penduduk}} \times 1000$$

$$= \frac{9.323 - 7.662}{330.974} \times 1000 = 9,30$$

Angka Migrasi Netto Kota Sukabumi adalah 9,30 hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2016 adalah sebanyak 9 - 10 jiwa.

Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 28,16% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 23,15%.

Jadi Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 9 - 10 jiwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 321.328 jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu, dan Cibeureum.
2. Jumlah dan persebaran penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 yang terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cikole (18,72%) dan yang terkecil berada di wilayah Kecamatan Baros (10,53%), persebaran penduduk tersebut masih sama keadaannya dengan Tahun 2015 Kecamatan Cikole (18,82%), Kecamatan Baros (10,43%) dan Tahun 2014 Kecamatan Cikole (18,95%), Kecamatan Baros (10,45%).
3. Kepadatan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 330.974 jiwa dibandingkan Luas Wilayah 48 km² adalah 6.895 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.895 s.d 6.896 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Tahun 2015 adalah 6.693 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.693 s.d 6.694 jiwa, dan kepadatan penduduk Tahun 2014 adalah 6.679 artinya tiap 1 km² dihuni oleh penduduk sebanyak 6.679 s.d 6.680 jiwa, terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebanyak 202 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 serta Grafik 3.5 dan Grafik 3.6 di bahwa ini :

4. Struktur umur penduduk Kota Sukabumi tergolong Penduduk Produktif. Data Tahun 2016 menunjukkan sebesar 68,52% (Kota Maju bukan Kota Berkembang) karena kurang dari 30% penduduk Kota Sukabumi berumur <15 tahun (Penduduk Muda) yaitu 25,39% dan kurang dari 15% berumur 65 tahun atau lebih yaitu 6,09%.
5. *Sex Ratio* Kota Sukabumi Tahun 2016 yaitu 101,81 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 s.d 102 penduduk laki-laki. Keadaan tersebut berbeda dengan *Sex Ratio* Tahun 2015 yaitu 102,07 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 s.d 103 penduduk laki-laki.
6. Jumlah penduduk Kota Sukabumi sebesar 330.974, sebanyak 317.878 atau 96,04% beragama Islam, selanjutnya Agama Kristen sebesar 2,07%, Agama Katholik sebesar 0,98%, Agama Budha 0,89%, disusul Agama Hindu sebesar 0,01%, Khonghucu dan Kepercayaan sebesar 0%.
7. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kota Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 91.597 (92,86%) dari jumlah 98.636 Kepala Keluarga. Apabila dibandingkan dengan kepemilikan KK Tahun 2015 sebanyak 88.055 (94,55%) dari jumlah 93.140 Kepala Keluarga.
8. Ratio atau perbandingan Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3,36 menunjukkan setiap Kepala Keluarga rata-rata berisi 3-4 jiwa.
9. Kepemilikan KTP Tahun 2016 sebesar 221.418 orang dari wajib KTP sebanyak 233.618 orang, sedangkan kepemilikan KTP pada Tahun 2015 sebesar 212.488 orang dari wajib KTP sebanyak 228.205 orang.

10. Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 304.908 jiwa (94,89%) dari jumlah penduduk sebanyak 330.974 jiwa. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Citamiang sebanyak 36.589 jiwa (98,53%), sedangkan kepemilikan Akta Kelahiran terendah berada di Kecamatan Baros sebanyak 30.491 jiwa (90,99%).
11. Penduduk Kota Sukabumi yang memiliki Akta Perceraian atau surat cerai sebanyak 856 jiwa (4,29%) dari sejumlah 19.967 penduduk yang status perkawinannya cerai. Hal tersebut dikarenakan banyak penduduk yang sudah bercerai/berpisah dengan pasangan hidupnya, akan tetapi tidak melaporkan peristiwa kependudukannya.
12. Pada Tahun 2016 di Kota Sukabumi terdapat 6.145 Ibu Bersalin. Dari data tersebut dapat dihitung Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) dan Angka Fertilitas Umum (*General Fertility Rate/GFR*).
13. Cakupan kunjungan bayi tahun 2016 sebesar 98.97 % atau 5.880 bayi dari 5.941 bayi lahir hidup, dengan demikian telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 86%. Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergitas, koordinasi dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.
14. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sukabumi pada prinsipnya sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari indikator penelitian masih terdapat sekitar 0,0001% penduduk yang belum melek huruf, hal ini dikarenakan terdapat penduduk yang sudah berusia lanjut namun mereka melek huruf arab dan dapat membaca angka, serta sudah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar baik di lembaga formal maupun informal dikarenakan usia yang sudah lanjut.

-
15. Kondisi prevalensi peserta KB aktif pada Tahun 2016 mencapai 73,20% lebih tinggi dari target RPJMD 2013-2018 Kota Sukabumi yaitu sebesar 67,45% menandakan bahwa cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kota Sukabumi telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 16. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dalam arti sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 5.188 atau 85,65% dari jumlah pencari kerja sebanyak 5.969, sedangkan pencari kerja yang belum ditempatkan dalam arti belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 781 atau 15,05%.
 17. Migrasi penduduk masuk ke Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2016 paling banyak ke Kecamatan Cikole sebanyak 1.706 jiwa atau 18,29% dari total migrasi masuk, sedangkan migrasi masuk yang paling sedikit berada di Kecamatan Lembursitu sejumlah 1.039 jiwa atau 11,14% dari total migrasi masuk.
 18. Migrasi keluar penduduk Kota Sukabumi per kecamatan Tahun 2016 paling banyak dari Kecamatan Cikole sebanyak 1.546 jiwa atau 20,17% dari total migrasi keluar, sedangkan migrasi keluar yang paling sedikit dari Kecamatan Warudoyong sebanyak 701 jiwa atau 9,15% dari migrasi keluar.
 19. Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah Migrasi Netto Positif, karena jumlah migrasi masuk 28,16% lebih besar dibandingkan migrasi keluar 23,15%.
Jadi Migrasi Netto Kota Sukabumi Tahun 2016 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 9 - 10 jiwa.

5.2 Saran

1. Sumber daya manusia aparatur baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di kecamatan dan kelurahan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang kebijakan administrasi kependudukan yang baru.
2. Kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan masih rendah dan hanya pada saat masyarakat membutuhkannya, terutama updating biodata penduduk yang masih dianggap kurang begitu penting, sehingga perlu terus dilaksanakan sosialisasi secara inten kepada seluruh lapisan masyarakat.
3. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait dengan stelsel aktif dari pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dinamis, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut dengan sekurang-kurangnya tersedianya sarana prasarana yang memadai (seperti: perangkat komputer, jaringan komunikasi data, perekaman data biometrik, dan bahan material pendukungnya) dan sumber daya manusia (operator dan petugas lapangan) yang memahami dan mengerti tentang informasi teknologi.